

# **EUTHUNASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL**



## **Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

**OLEH :**

**Rosmini**

**10300113041**

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosmini  
NIM : 10300113041  
Tempat/Tgl. Lahir : Gattareng/12 Desember 1995  
Jur/Prodi.Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum  
Alamat : BTN Pao-Pao Permai  
Judul : Euthunasia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata,  
Penyusun,

Rosmini  
10300113041

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Euthanasia dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*", yang disusun oleh *Rosmini*, NIM: 10300113041, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 M, bertepatan 17 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 06 Desember 2017 M.

17 Rabiul Awal 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dra. Nila Sastrawati, M.Si (.....)

Munaqisy I : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (.....)

Munaqisy II : Ashar Sinilele, S.H., MM., M.H (.....)

Pembimbing I : Dr. Hamzah Hasan, M.HI (.....)

Pembimbing II : Dr. Fadli A. Natsif, M.H (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayang, memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul, “*Euthanasia* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Makassar. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan (jahiliah) menuju alam yang terang benderang, menyempurnakan akhlak manusia sebagai *rahmatan lil alamin* sekaligus penutup para Nabi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung terutama keluarga besarku yang memberikan semangat dan mendoakanku, Ayahandaku tercinta Masnug dan Ibunda tersayang Halija yang dengan penuh cinta dan kesabaran serta kasih sayang dalam membesarkan, mendidik dan mendukung penulis yang tidak henti-hentinya memanjatkan do’a demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis. Saudaraku tercinta mulai dari yang pertama sampai yang ke-tujuh pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan moral maupun materi, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, Keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih serta penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. selaku Wakil Rektor II dan Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph.D. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. selaku pembantu dekan I. Dr. Hamsir., S.H, M.H. selaku pembantu dekan II. Dr. Saleh Ridwan, M.Ag. selaku pembantu dekan III.
3. Dra. Nila Sastrawati, M. Si selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Dr. Kurniati, M.Hi selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan seluruh dosen pengajar yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis serta staff akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas bantuan yang diberikan selama berada di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para pengelola atau pustakawan yang telah banyak membantu dalam memenuhi kebutuhan referensi kepada penulis.
5. Dr. Hamzah Hasan, M. Hi. Selaku Pembimbing I dan Dr. Fadli A. Natsir, SH., MH. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan perhatiannya dengan penuh kesabaran serta ketulusan yang diberikan kepada penulis.



6. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku penguji I dan Ashar Sinilele, SH., MM., MH. selaku penguji II yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
7. Saudara-saudariku, Muhammad Alwi Masnung, Syahrir Masnung, Ishak Masnung, Abd. Rahim Masnung, Mukhlis Masnung, Lc., Hawirah Masnung, M.Thi., Lukman Masnung, penulis hanya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala do'a, motivasi, bantuan dan dukungan berupa materi maupun moral yang diberikan kepada penulis.
8. Sahabat Andi Futri Johar, Bulan Sahati, S.E, Musdalifah Taftim, S.Kep, Andi Sriyunita, S.KM, Muh. Irham, S.H., Nasrun, Susi Sugiarti, S.H., Nurul Hazanah, Nurhidayah A. Hambali, St. Nursari Fadilah yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis disaat susah maupun senang, atas kebaikan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Terkhusus Saudara-saudariku Wesesa Dwipamah, Muh. Aksan Ramadhan, Sabri dan Wisnu Agung Pancoro yang telah banyak mewarnai hidup penulis baik suka maupun duka, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk segala kebaikannya, perhatiannya dan pengorbanannya kepada penulis.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan terkhusus HPK A, terima kasih atas segala kebersamaan dan canda tawa kalian.
11. Keluarga KKN angkatan 54 Desa Parang loe Kecamatan Ermerasa Kabupaten Bantaeng khususnya Selviani, S.Pd, Muh. Soleh Jamal, S.H, Nelly Ariska, S.Pd, Dewi Puspitarani, Datsir, Muh. Kahfi yang banyak memberikan motivasi dan semangat penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih, baik moral maupun material kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jugalah penulis serahkan segalanya, semoga semua pihak yang membantu mendapatkan pahala di sisi Allah SWT., serta skripsi ini bermanfaat bagi semua orang terkhusus bagi penulis sendiri.

Samata, 09 November 2017

Penulis

ROSMINI

10300113041



## DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
BAB I     PENDAHULUAN .....	1-13
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Pengertian Judul .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
BAB II     EUTHUNASIA DAN KEJAHATAN TERHADAP NYAWA .....	14-37
A. Euthanasia .....	14-34
1. Pengertian Euthanasia .....	14
2. Konsep Kematian .....	24
3. Sejarah Euthanasia .....	26
4. Macam-Macam Euthanasia .....	28
B. Kejahatan Terhadap Nyawa .....	35-37
1. Pengertian Tindak Pidana Terhadap Nyawa .....	35
2. Jenis-Jenis Kejahatan Terhadap Nyawa .....	36
BAB III     EUTHANASIA DALAM KODE ETIK KEDOKTERAN DAN HUKUM KESEHATAN .....	38-61
A. Euthanasia Dalam Etik Kedokteran .....	38
B. Hukum Kesehatan .....	47



BAB IV	HUBUNGAN ANTARA HUKUM NASIONAL DENGAN	
	HUKUM ISLAM TENTANG EUTHANASIA .....	62-84
	A. Pandangan Hukum Positif Terhadap Euthanasia .....	62
	B. Hukum Euthanasia Menurut Syari'at Islam .....	74
BAB V	Penutup .....	85-86
	A. Kesimpulan .....	85
	B. Implikasi .....	86
	DAFTAR PUSTAKA .....	87
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
أُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...   آ...	Fathah dan alif atau yaa'	A	a dan garis diatas
إِ	Kasrah dan yaa'	I	I dan garis diatas
أُ	Dhammah dan waw	U	u dan garis diatas

Contoh:

مات : *maata*  
رَمَى : *ramaa*  
قِيلَ : *qiila*  
يَمُوتُ : *yamuutu*

#### 4. Taa' marbuutah

Transliterasi untuk *taa'marbuutah* ada dua, yaitu *taa'marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakatfathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *taa'marbuutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa'marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa'marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al- atfal*  
الْقَاضِيَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*  
نَجَّيْنَا : *najjainaa*  
الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَم : *nu''ima*

عَدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi (i).

Contoh :

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :



تَأْمُرُونَ : *ta'muruuna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### **8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Conto: *Fizilaal Al-Qur'an*

*Al-Sunnahqabl al-tadwin*

### **9. Lafz al- Jalaalah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh : دِيْنُالله *diinullah* بِالله *billaah*

Adapun taamarbuutah diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh : *hum fi rahmatillaah*

## 10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa ma muhammadunillaarasul*

*Inna awwalabaitinwudi' alinnasilallazii bi bakkatamubarakan*

*Syahruramadan al-laziiunzilafih al-Qur'an*

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, abu al-Walid Muhammad Ibnu)  
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

Swt.	= <i>subhanallahuwata'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihiwasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**NAMA : ROSMINI**

**NIM : 10300113041**

**Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana dan Ketatanegaraan**

**Judul :Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional**

---

Rumusan penelitian yang ingin dicapai adalah bagaimana *euthunasia* dalam kode etik kedokteran dan Hukum kesehatan? bagaimana hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam tentang euthunasia?

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan syar'i. Penelitian ini mengambil sumber data yang diperoleh dari data primer, data sekunder dan data tersier yang diolah dengan *identifikasi*, *reduksi* dan *editing* dan dianalisis secara kuantitatif sehingga mengungkap hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan.

euthunasia bertentangan dengan etik kedokteran, pasal 7d, “seorang dokter harus senangtiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani”. Tindakan euthunasia menurut kode etik kedokteran Indonesia tidak membolehkan dilakukannya euthanasia aktif dan kelihatannya membolehkan euthanasia pasif dalam menghadapi pasien yang menurut perkiraan berdasarkan ilmu kedokteran sudah tidak mungkin disembuhkan lagi. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Walaupun euthunasia itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman namun kenyataanya di Indonesia, sejak terbentuknya kitab undang-undang hukum pidana sampai sekarang belum ada kasus nyata dan di putus oleh pengadilan. Menurut Hukum Islam bahwa euthunasia pasif, di mana seorang dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut perkiraannya tidak mungkin disembuhkan lagi, atas permintaan pasien atau keluarganya, hukumnya dibolehkan. Termasuk juga dalam kategori ini, penghentian pengobatan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkannya.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Perlu adanya perumusan Undang-Undang tentang euthanasia supaya ada ketetapan hukumnya. 2). Para ulama di Indonesia harus membahas dan menetapkan hukumnya sesuai dengan perkembangan zaman.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Kematian merupakan suatu hal yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup termasuk manusia. Hidup dan mati merupakan masalah yang hakiki manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang paling sempurna karena dilengkapi akal, pikiran dan rasa. Dengan menggunakan akal dan pikirannya itulah manusia dapat menciptakan teknologi modern khususnya teknologi kedokteran untuk mempermudah menjalankan aktifitasnya seperti berusaha menunda kematian seseorang dengan berbagai cara termasuk temuan teknologi untuk menyembuhkan kesehatan manusia. Dengan adanya perkembangan di bidang teknologi kedokteran, maka diagnosa mengenai suatu penyakit dapat dilakukan dengan lebih sempurna dan akurat, sehingga pengobatannya pun dapat dilakukan secara efektif.<sup>1</sup> Tetapi sebaliknya, dengan adanya penemuan teknologi yang semakin hari semakin canggih tersebut membawa suatu konsekuensi kepada manusia seperti halnya *euthunasia*.

Dalam perkembangan peralatan kedokteran yang modern itu pula, penderitaan dan rasa sakit seorang pasien dapat diringankan, hidup seorang pasien pun dapat diperpanjang untuk suatu waktu tertentu, dengan menggunakan obat dan alat tertentu. Namun kenyataannya, meskipun teknologi di bidang kedokteran semakin maju, masih ada beberapa pasien yang tidak dapat dihindarkan dari penderitaan yang sangat berat. Seorang pasien yang mengidap penyakit tertentu, sulit untuk disembuhkan seperti halnya penyakit kanker ganas. Penderitaan yang berat baru akan lepas jika

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1.

kematian telah datang, namun kematian itu sendiri merupakan suatu misteri yang sulit untuk ditebak, karena pada umumnya tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti kapan datangnya kematian tersebut.<sup>2</sup>

Masyarakat pada umumnya banyak yang belum terlalu mengenal *euthunasia* tapi sebagian dari mereka mengenal *euthunasia* itu mematikan seseorang. Tidak sedikit pasien yang menderita penyakit serius dan bertahun-tahun menerapkan *euthunasia*, baik tim kesehatan itu sendiri yang menggunakan cara ini karena pasien yang sudah sekarat dan tidak dapat tertolong lagi. *Euthunasia* biasanya di berikan suntikan mati kepada pasien atas permintaan pihak keluarga ataupun saudara terdekat pasien yang sudah pasrah dengan keadaannya, akan tetapi tak jarang juga pasien sendiri yang meminta untuk mengakhiri hidupnya dengan alasan sudah tidak bisa menahan rasa sakit yang di deritanya dan tidak ada harapan untuk sembuh kembali.

Ada beberapa yang menganggap *euthunasia* itu legal seperti Belanda dan Australia, tetapi tidak sedikit juga negara yang menganggap *euthunasia* itu melanggar hukum.<sup>3</sup> Boleh *euthunasia* diartikan sebagai perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Secara umum perdebatan tentang setuju atau tidak setuju dengan *euthunasia* dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Golongan pertama yang menyatakan tidak setuju dengan adanya *euthunasia* dengan alasan bahwa euthunasia pada hakekatnya tindakan bunuh diri yang secara tegas dilarang oleh berbagai agama dan dianggap sebagai suatu

---

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 2-3.

<sup>3</sup> Ari Budi, *Jurnal Tentang Euthunasia* (Selasa, 02 Desember 2014). Aribud Jurnal Tentang Eutanasia.Htm



pembunuhan terselubung yang secara tegas merupakan perbuatan melanggar hukum.

- b. Golongan kedua yang setuju dengan *euthunasia* dengan alasan bahwa *euthunasia* adalah hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia untuk menentukan hidupnya termasuk hak untuk mati yang sejajar kedudukannya dengan hak untuk hidup dan diperkuat dengan alasan bahwa keputusan *euthunasia* adalah keinginan dari diri sendiri pemohon *euthunasia*.<sup>4</sup>

Secara yuridis berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, *euthunasia* belum diatur secara jelas. Menurut pengertian kedokteran forensik, *euthunasia* adalah salah satu bentuk pembunuhan, dimana seseorang dimatikan dengan maksud untuk mengakhiri penderitaan orang tadi.<sup>5</sup>

Tindakan seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya mengobati seorang pasien, selalu bertujuan menyembuhkan penyakitnya dan menyelamatkan jiwanya. Hal ini sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia, “kewajiban dokter terhadap pasien: seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani”.

Iktikad baik dokter tersebut menyebabkan dia dibebaskan dari tuntutan hukum, andaikata tindakannya dalam mengobati pasien, menyebabkan pasien tersebut meninggal dunia. Pembebasan dari tuntutan ini berlaku apabila pengobatan tersebut dilakukan sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku dan diakui oleh kalangan kedokteran. Akan tetapi apabila pengobatan tersebut tidak melalui dan tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang berlaku, dan tindakan tersebut mengakibatkan

---

<sup>4</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015. Tinjauan-Yuridis-Euthanasia-Dilihat-Dari-Aspek-Hukum-Pidana%20(1).Pdf

<sup>5</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

hilangnya nyawa orang lain, maka dokter tersebut bisa dituntut dan dijatuhi hukuman. Adapun pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bisa dikaitkan dengan *euthunasia* yaitu pasal 344, 340 dan 359.

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal 338 sampai dengan pasal 350.

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan. Jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut :

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya moord. Doodslag diatur dalam pasal 338 KUHP sedang moord diatur dalam pasal 340 KUHP.
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 334 KUHP.

3. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 345 KUHP.<sup>6</sup>

Adapun pandangan agama Islam, kelahiran dan kematian merupakan hak dari Tuhan sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai hak untuk memperpanjang atau memperpendek umurnya sendiri. Tindakan *euthunasia* secara tegas dilarang dengan alasan apapun karena termasuk tindakan pembunuhan. Dokter bisa dikategorikan melakukan dosa besar dan melawan kehendak Tuhan yaitu memperpendek umur seseorang. Orang yang menghendaki *euthunasia* walaupun dengan penuh penderitaan bahkan kadang-kadang dalam keadaan sekarat dapat dikategorikan putus asa dan putus asa tidak diperkenankan oleh Tuhan.<sup>7</sup>

Hidup dan mati bukan merupakan hak dan wewenang manusia, melainkan hak dan kewenangan Allah swt. Siapapun tidak berhak memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan meminta orang lain untuk menghilangkan nyawanya. Apabila hal itu terjadi, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Allah dan dianggap sebagai tindak pidana.

Dalam al-qur'an menjelaskan yang mengatur tentang sanksi hukum pembunuhan diantaranya: Al-qu'an surah Al-Nisaa' ayat 93 dengan terjemahnya:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

---

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 11-12.

<sup>7</sup> Ari Budi, *Jurnal Tentang Euthunasia* (Selasa, 02 Desember 2014). Aribud Jurnal Tentang Eutanasia.Htm

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.<sup>8</sup>

Dasar hukum yang mengatur sanksi hukum di dalam hadis dengan arti: “diriwayatkan dari abdullah bin mas’ud ra. Katanya: rasulullah saw. Bersabda: setiap pembunuhan secara zalim, maka putra nabi adam yang pertama itu akan mendapat bagian darahnya, (mendapat dosa) karena dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan.”<sup>9</sup>

Dari ayat dan hadis dijelaskan bahwa larangan membunuh sesama dan manusia tidak berhak menentukan hidup dan mati seseorang. Siapun tidak berhak memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan meminta orang lain untuk menghilangkan nyawanya. Apabila itu terjadi, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Allah awt dan dianggap sebagai tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka akan diteliti lebih lanjut tentang *euthunasia* dengan judul **“Euthunasia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana *Euthunasia* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Dengan submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *euthunasia* dalam kode etik kedokteran dan Hukum kesehatan ?

---

<sup>8</sup> Lajnah Pentashihah, *Al-Quran & Terjemah* (Bekasi: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), h. 93.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 24-30.

2. Bagaimana hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam tentang euthunasia ?

### **C. Pengetian Judul**

1. *Euthunasia*/Euthanasia/Eutanasia yang berarti mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang dengan cara kematian yang tenang dan mudah untuk menamatkan penderitaannya.<sup>10</sup>
2. Perspektif adalah pengharapan; peninjauan; tinjauan; padang luas.<sup>11</sup>
3. Hukum Islam/fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadis.<sup>12</sup>
4. Hukum Nasional adalah peraturan-peraturan yang memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.<sup>13</sup>

### **D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

1. J. Guwandi dalam bukunya Hukum medik (medic law) menyatakan bahwa Keputusannya: di dalam keadaan di mana kemauan seseorang pasien kronis komateus tidak dapat dipastikan secara jelas, maka perundang-undangan dari negara bagian yang berlaku. Hal ini berarti

---

<sup>10</sup> Ahmad Ramali, St.Pamoentjak , Hendra T.Laksman, *Kamus Kedokteran* (Cet.26; Jakarta: Djambatan, 2005), h. 117.

<sup>11</sup> Widodo, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolut, 2002), h. 561.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 1.

<sup>13</sup> Simorangking Dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 66.

bahwa dalam kasus Nancy Cruzan pemberian makanan tidak boleh dihentikan, karena dilarang di negara bagian Missouri. Namun buku ini hanya menggambarkan contoh seseorang yang ingin melakukan *euthunasia*.

2. Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya Etika & Hukum Kesehatan menyatakan bahwa euthunasi berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata “eu” yang artinya baik, tanpa penderitaan, dan “tanathos” yang artinya mati. Jadi “euthunasia” artinya mati dengan baik, atau mati dengan tanpa penderitaan atau mati cepat tanpa derita. Jenis euthanasia dibedakan menjadi 2 yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Namun buku ini hanya membahas euthunasia secara umum.
3. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan menyatakan bahwa pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan. Dalam buku ini menggambarkan undang-undang kejahatan terhadap nyawa tapi belum ada undang-undang yang spesifik perbuatan *euthunasia*.

#### ***E. Metode Penelitian***

Pada bagian metode penelitian dijelaskan cara penelitian itu akan dilakukan, yang di dalamnya mencakup bahan atau materi penelitian, alat, jalan penelitian, variabel dan data yang hendak disediakan dan analisis data.



Bahan atau materi penelitian dapat berupa uraian tentang populasi dan sampel penelitian, serta informan. Populasi, sampel, dan informan haruslah dijelaskan secara spesifik, termasuk menyebutkan dengan jelas sifat dan kategori populasi, sampel, dan responden penelitian.<sup>14</sup>

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.<sup>15</sup>

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan data tentang *Euthunasia* dengan bantuan bermacam-macam sumber materi yang terdapat di perpustakaan, seperti buku-buku, jurnal, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini.

---

<sup>14</sup> Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa* (Cet. 2; Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 70.

<sup>15</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. 2; Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 19.

<sup>16</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Cet. 1; Jakarta: Granit, 2004), h. 1.

## 2. Metode Pendekatan

### a. Pendekan Normatif

Pendekan Normatif yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>17</sup>

### b. Pendekatan Syar'i

Pendekatan Syar'i adalah pendekatan yang menggunakan ilmu syari'ah terkhusus fiqh jinayah yang terkait dengan euthunasia yang dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan.

## 3. Sumber Data

Penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
  - a. Norma atau kaedah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Peraturan dasar:
    - Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
    - Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

---

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Cet. 1; Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

- c. Peraturan perundang-undangan:
    - Undang-undang dan peraturan yang setaraf
    - Peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf
    - Keputusan presiden dan peraturan yang setaraf
    - Keputusan menteri dan peraturan yang setaraf
    - Peraturan-peraturan daerah
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
  - e. Yurisprudensi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>18</sup>

#### 4. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data

##### a. *Pengolahan Data*

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelolah data yang di peroleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokkan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan relevan. Data yang

---

<sup>18</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 31-32.

diambil adalah data yang berhubungan dengan materi *euthunasia* (analisis komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum Islam).

2. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk di pahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
3. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

b. *Analisis Data*

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah metode yang menjelaskan dengan menggunakan atau bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola yang penting untuk di pelajari dan memutuskan yang dapat diangkat kembali dengan data-data yang berasal dari literatur membaca.

***F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

*1. Tujuan penelitian*

adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum yaitu:

Untuk mengetahui peranan hukum yang berlaku tentang *Euthunasia*

b. Tujuan Khusus yaitu:

- 1) Untuk mengetahui *euthunasia* dalam kode etik kedokteran dan Hukum kesehatan
- 2) Untuk mengetahui hubungan antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam tentang euthunasia

2. *Kegunaan Penelitian*

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan Sebagai bahan informasi yang bisa berguna bagi ilmu pengetahuan baik di bidang kesehatan maupun hukum. Sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum.

b. Praktis

Sebagai bahan masukan guna menambah wawasan dalam penelitian khususnya di bidang hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan sekaligus sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang ada.

## BAB II

### ***TINJAUAN UMUM TENTANG EUTHUNASIA DAN HUKUM ISLAM***

#### **A. Euthunasia**

##### **1. Pengertian Euthunasia**

Euthunasi berasal dari bahasa Yunani, dari akar kata “eu” yang artinya baik, tanpa penderitaan, dan “tanathos” yang artinya mati. Jadi “euthunasia” artinya mati dengan baik, atau mati dengan tanpa penderitaan atau mati cepat tanpa derita.<sup>1</sup> Secara harfiah Euthunasia terdiri dari dua kata: eu dan thanasia. Eu berarti “baik”, dan thanasia berarti “mati”. Euthunasia berarti mati secara baik, atau mati secara tenang. Biasanya, penderita yang melakukan euthanasia seperti ini telah menderita sakit berat. Di negeri-negeri di mana hukum telah membolehkan seseorang melakukan euthanasia, penderita yang tidak kuat lagi menahan sakitnya yang telah lama, meminta diberi kesempatan oleh dokter untuk mati.<sup>2</sup> Euthanasia atau euthanatos yang diterjemahkan secara bebas sebagai mati dengan baik tanpa penderitaan. Kematian ini ditujukan kepada mereka yang secara medis tidak lagi mempunyai harapan untuk sembuh dan penyakitnya telah membuat pasien menderita, sedangkan batas waktu penderitaan itu tidak jelas sampai berapa lama lagi. Oleh karena itu, untuk alasan kemanusiaan dan belas kasih yang besar maka seseorang dapat memilih untuk mengakhiri penderitaannya dengan cara ini.<sup>3</sup>

John Suryadi dan S. Koencoro mengemukakan bahwa menurut arti bahasa euthunasia itu adalah obat untuk mati dengan tenang. Sementara menurut dr. Med. Ahmad Ramli dan K. St. Pamoentjak, euthunasia berarti mati suci derita.<sup>4</sup> Sautinius dalam buku *Vitaceasarum* merumuskan bahwa euthanasia adalah mati cepat tanpa derita. Menurut Richard Lamerton, euthanasia pada abad ke-20 ditafsirkan sebagai pembunuhan atas dasar belas kasihan (mercy killing). Juga diartikan sebagai perbuatan membiarkan seseorang mati dengan sendirinya

---

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 144.

<sup>2</sup> Tarmizi Taher, *Medical Ethics* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 77.

<sup>3</sup> Alexandra Ide, *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan* (Cet. 1; Yogyakarta: Gresia Book Publisher, 2012), h. 65

<sup>4</sup> Ahmad Ramali, St.Pamoentjak, *Kamus Kedokteran* (Jakarta: Jambatan, 1986), h. 68.



(mercy dead), atau tanpa berbuat apa-apa membiarkan orang mati. Pengertian tersebut tampaknya semata-mata dilihat dari sudut sifat kematian (tanpa penderitaan) atau dari sudut perbuatan pasif berupa membiarkan seseorang mati tanpa usaha untuk mempertahankan kehidupannya. Pengertian seperti itulah tidak menggambarkan kehendak orang yang mau mati itu. Padahal kehendak itulah yang mahapenting dan menjadi unsur esensieel dari euthanasia. Oleh karena itu, sebaiknya istilah euthanasia diartikan sebagai membunuh atas kehendak korban sendiri.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Euthanasia Study Group suatu *Commissie* dari *Gazond Heidsraad* (Belanda): euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seseorang pasien dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri. Dengan demikian euthanasia dapat diartikan mati dengan baik tanpa penderitaan. Dalam bahasa Inggris kita jumpai istilah “*Mercy Killing*” yang berarti pembunuhan berdasarkan rasa belas kasihan.<sup>6</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat diambil intisari bahwa euthanasia adalah usaha, tindakan dan bantuan yang dilakukan oleh seorang dokter untuk dengan sengaja mempercepat kematian seseorang, yang menurut perkiraannya sudah hampir mendekati kematian, dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskannya dari penderitaannya.<sup>7</sup>

Baru-baru ini, Wesley Smith, seorang aktivis anti-euthanasia terkenal dan pengarang yang memenangkan penghargaan karena bukunya, *The Culture Of Death- The Assault On Medical Ethics In America*, telah membuka kedok usaha yang dianggap membahayakan dari sekelompok orang yang bernama *The Right to Die Society of Canada*. kelompok ini telah membuat apa yang disebut “*exit bag*”, yakni sejenis kantung plastik yang bisa dipakai untuk orang yang hendak mengakhiri hidupnya sendiri. Kantung tas itu diperjualbelikan seharga US\$ 32, sementara buku pengantar bunuh dirinya dijual seharga US\$ 10, belum termasuk biaya kirim. Smith menuduh bahwa kelompok itu telah melanggar undang-undang yang

---

<sup>5</sup> Ari Yunanto & Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik* (Cet. 1; Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), h. 57

<sup>6</sup> Alwi Jaya, *Etika & Hukum Kesehatan* (Cet. 1; Takalar Sulawesi Selatan: Pustaka As Salam, 2014), h. 145

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 12-13.

berlaku di Kanada soal euthanasia. Peristiwa ini semakin menyadarkan kita semua bahwa permasalahan euthanasia tidaklah remeh, dan selalu menghadirkan kontroversi, bukan saja di negeri kita sendiri, bahkan juga di negara-negara Barat yang liberal sekali pun.<sup>8</sup>

Pentingnya masalah etika dalam profesi kedokteran, di mana “mati” terkait dengan profesi dokter. Tugas dokter antara lain adalah memperpanjang hidup, hidup yang berkualitas. Padahal si dokter dan penderita telah gagal memberi hidup yang berkualitas. Penderita tidak tahan lagi dengan peneritaannya dan dokter juga merasa kasihan pada “penderitaan yang berat” dan berkepanjangan dari pasien tersebut. Itulah dilema yang dihadapi. Mula-mula ilmu kedokteran dan semua agama tidak menerima dan tidak memberi izin atas permintaan penderita untuk euthanasia. Namun kini telah terjadi perubahan. Di negara-negara sekuler dengan dalih macam-macam suatu permintaan euthanasia dapat dikabulkan oleh suatu tim, bukan pribadi dokter. Beberapa negara bagian di AS, dan beberapa negara di Eropa telah mengizinkan euthanasia, demikian juga Australia dan Selandia Baru.<sup>9</sup>

Ada beberapa contoh kasus euthanasia seperti Nancy Cruzan (32), U.S. Supreme Court, 1983 merupakan salah satu pasien koma yang terkenal di Amerika. Pada tahun 1983 ia telah mengalami kecelakaan mobil. Ia dipertahankan hidupnya dengan pemberian makanan dan cairan artifial. Orang tua Nancy telah mengajukan permohonan kepada pengadilan di Missouri untuk menghentikan segala pengobatan dan pemberian makanan karena Nancy telah menyatakan tidak ingin hidup jika terus dalam keadaan seperti ini.<sup>10</sup>

Pengadilan telah mengabulkan permintaan orang tua Nancy ini. Namun jaksanya telah naik banding dan ternyata Missouri Supreme Court telah membatalkan keputusan itu dan menolak permintaan orang tua Nancy itu. Menurut pengadilan tinggi ini, Nancy tidak dalam keadaan sakaratulmaut dan pemberian makanan artifial tidak membebankan. Lagipula pengadilan tinggi ini tidak dapat menerima pernyataan Nancy yang dikemukakan orang tuanya itu, karena tidak ada buktinya. Orang tuanya naik banding lagi ke U.S. Supreme Court

---

<sup>8</sup> Tarmizi Taher, *Medical Ethics*, h. 77-78.

<sup>9</sup> Tarmizi Taher, *Medical Ethics*, h. 78.

<sup>10</sup> J. Guwandi, *Hukum Medik (Medic Law)*, (Cet.2; Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005), h. 247.

untuk mempertanyakan: apakah hak untuk menentukan nasib sendiri dari Nancy sebagai hak konstitusional tidak harus didahulukan daripada suatu keputusan peradilan tinggi Missouri.<sup>11</sup>

Keputusannya: di dalam keadaan di mana kemauan seseorang pasien kronis komateus tidak dapat dipastikan secara jelas, maka perundang-undangan dari negara bagian yang berlaku. Hal ini berarti bahwa dalam kasus Nancy Cruzan pemberian makanan tidak boleh dihentikan, karena dilarang di negara bagian Missouri.

Contoh kasus lain yaitu seorang pasien manula, berumur 93 tahun yang berada dalam keadaan koma, oleh dokternya dengan sadar diberikan injeksi : k.l. 80 mg morfin dan 2 mg atropine. Kemudian ditambah dengan k.l 20 mg alloferine agar pasien itu meninggal. Kemarinnya pasien jatuh dan kesakitan. Dokter memberikan k.l. 20 mg morfina. Karena sesudah 20-30 menit belum menolong, maka ditambah lagi dengan k.l. 20 mg morfina dan 2 ampul valium, sehingga pasien jatuh dalam keadaan koma (yang memang merupakan tujuan dokternya).<sup>12</sup>

Dokter ini telah mengenal pasien selama 25 tahun. Ia harus di ranjang terus, banyak menderita sakit seperti arthrosis dan jantung. Penglihatan dan pendengarannya juga berkurang. Namun pikirannya masih terang. Pasien telah berulang kali mengatakan bahwa ia tidak ingin hidup lagi dan ingin tidur terus.

Pernah menolak obat-obatan untuk memperpanjang hidup dan pemberian tindakan lainnya. Pasien berkeyakinan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan baginya dan harus dipikulnya. Kepercayaan merupakan penghalang untuk meminta euthanasia aktif.

Hakim memutuskan: terdakwa bersalah dan terbukti telah melakukan pembunuhan (dalam arti yuridis) dan dijatuhi hukuman bersyarat 1 minggu dengan masa percobaan 6 bulan. Pertimbangan hakim: penuntutan disiplin tidak menghalangi tuntutan pidana. Pengadilan berpendapat bahwa dokter itu bersalah terhadap delik pasal 338 (pembunuhan)

---

<sup>11</sup> J. Guwandi, *Hukum Medik (Medic Law)*, h. 248.

<sup>12</sup> J. Guwandi, *Hukum Medik (Medic Law)*, h. 246.

yang merupakan suatu kwalifikasi yuridis, walaupun tidak ada asosiasinya dengan arti pembunuhan yang umum dipakai sehari-hari.<sup>13</sup>

Yang terjadi motif tindakan euthanasia awalnya adalah membebaskan penderita dari penderitaan akibat penyakit yang berat dan lama, serta tidak ada harapan untuk sembuh. Namun demikian, kini telah terbongkar kasus-kasus euthanasia di Eropa dan Amerika, di mana izin untuk sebuah euthanasia tidak lagi ditentukan oleh tim dokter yang dibentuk oleh para dokter pribadi. Barangkali tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa uang telah menjadi faktor yang penting dalam dunia yang makin materialistik dan hedonistik seperti sekarang ini. Dalam lampiran 5 tentang terminal illness, euthanasia dibahas secara ilmiah dalam pertemuan dokter-dokter sedunia tahun 1983 oleh *World Medical association*. Dalam deklarasi venezia itu disebutkan bahwa kematian pasien yang disengaja seperti dalam praktek euthanasia tidak bisa diterima dengan tanpa kecuali. Bahkan, itu juga berlaku dalam kasus penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau abnormalitas seperti anencephalic. Sebagaimana tertuang dalam naskah Deklarasi Venezia tersebut, kewajiban dokter adalah “untuk menyembuhkan dan, bila memungkinkan, menghilangkan penderitaan dan bertindak untuk melindungi kepentingan pasiennya”. Selanjutnya, disebutkan juga, “tidak ada pengecualian dalam prinsip ini, bahkan dalam kasus penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau abnormalitas”. Sementara itu, mematikan penderitaan- apapun istilah yang dipakai- seperti euthanasia, yang juga sering disebut mercy killing, adalah hak Tuhan.<sup>14</sup>

Terkait dengan kematian (bukan hanya euthanasia) tersebut adalah transplantasi organ manusia, yang kadang-kadang melibatkan praktek-praktek kejahatan. Dari berbagai media, kita mengetahui adanya kejahatan internasional yang tersindikan (internasional crimes) yang terlibat dalam penyediaan organ-organ manusia untuk transplantasi seperti jantung dan ginjal. Barangkali bahaya yang paling besar dihadapi oleh negara berkembang dan miskin. Di kawasan-kawasan seperti itu, godaan jual-beli organ-organ tubuh manusia besar sekali.

---

<sup>13</sup> J. Guwandi, *Hukum Medik (Medic Law)*, h. 247.

<sup>14</sup> Tarmizi Taher, *Medical Ethics*, h. 79.

Konon, jual-beli organ-organ itu dimaksudkan untuk membantu menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi dalam praktik itu sekaligus berarti menghilangkan nyawa orang lain.<sup>15</sup>

Untuk mencegah terjadinya euthunasia yang tidak benar serta jual-beli organ manusia untuk transplantasi, tenaga kesehatan termasuk dokter berdiri paling depan dalam mendeteksi sindikat-sindikat global yang kini telah beroperasi di seluruh dunia. Dengan demikian, tampaklah bagi dokter, mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan, betapa beratnya hidup dalam godaan gemerincing uang untuk menyeleweng dari etika atau akhlak yang benar. Terkait dengan masalah euthunasia adalah definisi tentang kematian. Definisi “mati” bagi seorang dokter tidaklah sesederhana seperti puluhan tahun yang lalu. Dulu menentukan kematian cukup dengan pemeriksaan jantung pasien, dokter langsung memberi sertifikat kematian. Kini, kriteria kematian ada 4 hal, yaitu:

- a. Tidak ada reaksi sama sekali terhadap suatu rangsangan yang diberikan dari luar maupun dari dalam (unreceptive and unresponsive)
- b. Tidak ada penafsiran dan gerak otot
- c. Tidak ada refleks
- d. Elektro encephalogram (EEG) mendatar<sup>16</sup>

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pada tahun 1985 mengeluarkan pernyataan tentang mati itu. IDI berpendapat bahwa manusia dinyatakan tentang mati jika batang otaknya tidak berfungsi lagi. Dalam euthunasia kehendak pasien amat penting, karena yang menderita adalah mereka. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan yang mendasar dan kritis mengenai hal ini sering diajukan dan nampaknya di Negara-Negara tertentu pengadilan atau lembaga hukum semakin berperan, pengadilan dapat menerima atau menolak permintaan untuk mati.

Dalam dunia maju di mana nilai-nilai dan peran agama semakin terpinggirkan, euthunasia semakin banyak digunakan untuk “membantu” melepaskan pasien dari “penderitaan”. Kita perlu hati-hati dan waspada agar tidak ceroboh dalam perkara ini, bagaimanapun agama merupakan sesuatu yang penting bagi kita termasuk dalam pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Tarmizi Taher, *Medical Ethics*, h. 79-80.

<sup>16</sup> Tarmizi Taher, *Medical Ethics*, h. 80-81.



profesi. Di lain pihak, kita juga tahu bahwa interpretasi keagamaan sendiri juga perlu berkembang. Isu-isu euthunasia, penentuan saat-saat kematian dan masalah lain dalam bioteknologi yang menyangkut manusia akan selalu berkembang semakin kompleks. Oleh karenanya, sikap arif dan bijaksana dalam memecahkan isu-isu baru sangat dibutuhkan untuk mencari pemecahan yang terbaik.

Kalau terjadi perbedaan pandangan dan pendapat, hal itu sebenarnya adalah normal-normal saja dalam masyarakat terbuka dan demokrasi. Namun, yang mesti dicegah adalah pemaksaan kehendak dan segala kecenderungannya, termasuk pemaksaan yang dilakukan oleh suatu pihak, seolah-olah hanya pihak itu saja pemilik kebenaran, sementara orang lain pasti salah. Kebenaran mutlak hanya milik Allah dan selama kebenaran itu datang dari pikiran manusia, selama itu akan bersifat relatif dan akan dinilai kebenaran yang sesungguhnya dalam perjalanan waktu dan tempat.<sup>17</sup>

Belanda, salah satu Negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kesehatan mendefinisikan euthunasia sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh *Euthunasia Study Group* dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda):

“euthunasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri”.<sup>18</sup>

Definisi diatas menggambarkan bahwa euthunasia itu bukan hanya tindakan mengakhiri hidup seorang pasien yang sangat menderita saja, melainkan juga sikap diam, tidak melakukan upaya untuk memperpanjang hidupnya dan membiarkannya mati tanpa upaya pengobatan.<sup>19</sup> Definisi euthunasia yang dikemukakan di atas sedikit mencakup tiga kemungkinann:

- a. Memperbolehkan (membiarkan) seseorang mati.

---

<sup>17</sup> Tarmizi Taher, *Medical Ethics*, h. 82.

<sup>18</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan Edisi 4* (Cet. 4; Jakarta: Egcc, 2008), h. 188.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 13.



- b. Kematian karena belas kasihan.
- c. Mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan.<sup>20</sup>

Memperbolehkan seseorang mati mengandung pengertian tentang adanya suatu kenyataan, bahwa segala macam usaha penyembuhan terhadap penyakit seseorang, sudah tidak ada manfaatnya lagi. Secara medis usaha penyembuhan tersebut tidak ada hasilnya yang positif, malah dalam keadaan tertentu, ada kemungkinan pengobatan tersebut justru mengakibatkan bertambahnya penderitaan. Dalam keadaan demikian, seorang penderita lebih baik dibiarkan meninggal dalam keadaan tenang tanpa campur tangan manusia.<sup>21</sup>

Kematian karena belas kasihan merupakan suatu tindakan langsung dan disengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang yang didasarkan atas izin atau permintaannya. Hal ini disebabkan oleh kondisi penderita yang sudah tidak tahan lagi menanggung rasa sakit yang demikian berat. Keadaan ini tentu saja tidak sama dengan memperbolehkan seseorang mati, walaupun mungkin ada juga persamaannya.<sup>22</sup>

Pada peristiwa pencabutan nyawa seseorang karena belas kasihan memberikan pengertian terhadap suatu tindakan yang langsung menghentikan kehidupan penderita tanpa izinnya. Tindakan ini didasarkan atas asumsi bahwa kehidupan si penderita selanjutnya tidak ada artinya lagi. Tentu saja ada perbedaan antara peristiwa ini dengan kematian karena kasihan, yaitu bahwa dalam peristiwa yang terakhir ini tindakan dilakukan tanpa izin dan persetujuan si penderita.<sup>23</sup>

## 2. Konsep kematian

Berdasarkan pada terjadinya, kematian dapat dibedakan atas tiga jenis:

- 1) Orthothanasia merupakan kematian yang terjadi karena proses alamiah, karena penyakit, umur tua.

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 13.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. h. 14.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. h. 14.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. h. 14.

- 2) Dysthanasia adalah kematian yang terjadi secara tidak wajar seperti kecelakaan, dibunuh dan bunuh diri.
- 3) Euthanasia adalah kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.<sup>24</sup>

Perkembangan euthanasia tidak terlepas dari perkembangan konsep tentang kematian. Usaha manusia untuk memperpanjang kehidupan dan menghindari kematian dengan mempergunakan kemajuan iptek kedokteran telah membawa masalah baru dalam euthanasia, terutama berkenaan dengan penentuan kapan seseorang dinyatakan telah mati.<sup>25</sup> Di kenal beberapa konsep tentang mati seperti:

1. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1988, mati didefinisikan “behentinya darah mengalir”. Berdasarkan darah mengalir ini berarti jantung dan paru-paru berhenti bekerja. Oleh sebab itu menurut batasan ini, mati atau kematian itu terjadi apabila “jantung berhenti berdenyut”. Jantung berhenti berdenyut, berarti darah tidak dapat mengalir keseluruh tubuh yang berakibat semua fungsi tubuh berhenti total karena tidak ada aliran darah. Namun demikian dengan berkembangnya ilmu kedokteran, tampaknya konsep ini sudah tidak dapat digunakan lagi. Karena dengan teknologi resusitasi (nafas buatan) telah memungkinkan jantung dan paru-paru yang terhenti dapat terdenyut kembali. Dengan bekerjanya kembali dan jantung dan paru-paru ini maka akan terjadi aliran darah lagi ke seluruh tubuh, dan kembali hidup.
2. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh. Konsep ini juga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan teknologi resusitasi seperti disebutkan, seakan-akan nyawa dapat dikembalikan lagi.
3. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen untuk menjalankan fungsinya secara terpadu. Seperti kita ketahui bahwa organ-organ tubuh kita itu berfungsi secara terpadu yang dikendalikan oleh otak kita. Apabila semua organ tubuh kita yang masih berfungsi secara terpadu yang dikendalikan oleh otak, berarti kita masih hidup. Namun konsep ini

---

<sup>24</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan Edisi 5* (Cet. 5; Jakarta: Egcc, 2016), h. 148.

<sup>25</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan Edisi 3*, h. 105.

diragukan dan dipertanyakan juga. Karena tampaknya organ-organ tubuh berfungsi sendiri, dengan atau tanpa dikendalikan oleh otak kita. Hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa transplantasi pada tahap tertentu organ tubuh yang ditransplantasikan masih tetap berfungsi, meskipun sudah tidak di bawah kendali otak orang yang bersangkutan.

4. Batang otak telah mati (brain stem death). Seperti telah disebutkan di atas bahwa otak adalah merupakan pusat penggerak dan pengendali baik secara fisik dan sosial. Oleh sebab itu, bila batang otak telah mati maka diyakini manusia telah mati baik secara fisik dan sosial. Mati menurut konsep ini adalah hilangnya “hidup” manusia secara permanen, sehingga fisik dan sosialnya sudah tidak terhitung lagi.
  5. Menurut Undang-undang kesehatan no. 36 tahun 2009, pasal 117, seseorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan. Apabila kita perhatikan batasan kematian menurut undang-undang ini, sebenarnya merupakan suatu bentuk akomodasi dari berbagai batasan tentang kematian atau mati, yang sebelumnya telah ada atau dirumuskan.<sup>26</sup>
3. Sejarah Euthunasia

Euthunasia sebenarnya bukan masalah baru. Perbuatan ini sebenarnya sudah lama bahkan sudah sering dilaksanakan sejak zaman dahulu kala. Menurut Ilyas Efendi, pada zaman Romawi dan Mesir kuno euthunasia ini pernah dilakukan oleh dokter Olympus terhadap diri Ratu Cleopatra dari Mesir, atas permintaan sang Ratu, walaupun sebenarnya ia tidak sakit. Cleopatra (60-30 SM) seorang ratu yang cantik dan seksi dapat menundukkan dua pria perkasa pada zamannya, yaitu Yulius Caesar dan Markus Antonius, penguasa Imperium Romawi. Cleopatra mempunyai ambisi yang sangat besar untuk menaklukkan dan menguasai dunia. Akan tetapi ambisinya itu tidak tercapai, karena orang yang diharapkan akan memperjuangkannya melalui Senat, yaitu Yulius Caesar, mati dibunuh sebelum sidang dimulai oleh kelompok, yang antara lain terdiri dari anak angkatnya sendiri, yaitu Brutus.

---

<sup>26</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 144-145.

Orang kedua yang menggantikan Yulius Caesar, yaitu Markus Antonius, yang juga bertekuk lutut kepada sang ratu, gagal pula meraih kemenangannya dalam pertempuran, karena ia dikalahkan oleh lawannya, yaitu Oktavianus, dan kemudian ia mati bunuh diri. Cleopatra yang merasa kecewa dan putus asa, karena ambisi dan impiannya tidak terwujud akhirnya meminta kepada dokter Olympus untuk melakukan euthunasia terhadap dirinya. Dengan patukan ular beracun yang disiapkan oleh dokter Olympus, Cleopatra akhirnya pada usia 38 tahun menghembuskan nafasnya yang terakhir (meninggal dunia).<sup>27</sup>

Tindakan euthunasia pada zaman dahulu kala itu, banyak didukung oleh tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Menurut Imron Halimy, Plato misalnya, telah mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu, untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya. Demikian pula aristoteles telah membenarkan tindakan “infanticide”, yaitu membunuh anak yang berpenyakit sejak lahir dan mereka tidak dapat hidup menjadi manusia yang perkasa. Tokoh lain yaitu Pythagoras dan kawan-kawannya juga telah menyokong tindakan pembunuhan terhadap orang-orang yang mengalami lemah mental dan moral. Euthunasia juga pernah dilaporkan terjadi di India dan Sardinia.<sup>28</sup>

Pada masa perang dunia kedua, euthunasia juga pernah dilakukan di Jerman. Pada saat itu Hitler memerintahkan anak buahnya untuk membunuh orang-orang yang sakit, yang sudah tidak mungkin lagi disembuhkan, juga bayi-bayi yang lahir dengan menderita cacat bawaan.

Sekitar tahun 1989, masalah euthunasia ini mencuat lagi ke permukaan, sejak tersiarnya berita pembunuhan para pasien di rumah sakit Lainz, Wina, Austria. Sebanyak 49 orang pasien rumah sakit terbesar di kota Wina tersebut telah dibunuh oleh tiga orang perawat dengan alasan karena kasihan, berhubung pasien-pasien itu menderita sakit parah.<sup>29</sup>

#### 4. Macam-Macam Euthunasia

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 15.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 16.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 17.

Euthunasia dapat dibedakan menjadi beberapa macam, sesuai dengan dari mana sudut pandangnya atau cara melihatnya.

1. *Euthunasia dilihat dari cara dilaksanakannya*

Dilihat dari cara pelaksanaannya, euthunasia dibedakan menjadi:

1) Euthunasia pasif

Euthunasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia.<sup>30</sup> Menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hidupnya. Seorang pasien yang sedang menjalani perawatan, guna kelangsungan hidupnya dilakukan tindakan medis melalui berbagai cara termasuk memberikan obat. Apabila tindakan medis ini dihentikan, maka sudah barang tentu pasien ini meninggal.<sup>31</sup> Euthunasia pasif dilakukan atas permintaan dapat dinamakan “auto euthunasia”. Pengertian euthunasia pasif adalah suatu situasi di mana seorang pasien, dengan sadar menolak secara tegas untuk menerima perawatannya medis. Bahkan dalam hal ini ia menyadari bahwa sikapnya itu akan dapat memperpendek atau mengakhiri hidupnya sendiri.<sup>32</sup>

Dalam euthunasia pasif, dokter tidak memberikan bantuan secara aktif bagi mempercepat proses kematian pasien. Apabila seorang pasien menderita penyakit dalam stadium terminal, yang menurut pendapat dokter tidak mungkin lagi disembuhkan, maka kadang-kadang pihak keluarga karena tidak tega melihat salah seorang anggotanya keluarganya berlama-lama menderita di rumah sakit, lantas mereka meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan. Tindakan penghentian pengobatan ini termasuk kepada euthunasia pasif.<sup>33</sup>

Euthunasia pasif banyak dilakukan di Indonesia, atas permintaan keluarga setelah mendengar penjelasan dan pertimbangan dari dokter, bahwa pasien yang bersangkutan sudah

---

<sup>30</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan Edisi 4*, h. 119.

<sup>31</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, h. 146.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 20.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. h. 20.



tidak mungkin disembuhkan. Biasanya mereka (keluarga) memilih untuk membawa pulang pasien tersebut, dengan harapan ia meninggal dengan tenang di lingkungan keluarganya.<sup>34</sup>

Menurut dr. Rully Roesli terdapat pula jenis atau bentuk euthunasia lain, yaitu euthunasia “sikon” yakni suatu bentuk euthunasia yang dilakukan karena situasi dan kondisi ekonomi. Apabila seorang pasien masih ingin dan besar harapannya untuk hidup, dan dokter masih mampu mengupayakan pengobatan, tetapi berhubung kondisi ekonomi dan keuangan pasien yang tidak mampu membiayai pengobatannya. Maka upaya pengobatan tersebut terpaksa dihentikan. Akibatnya mungkin si pasien meninggal. Gambaran semacam inilah yang disebut dengan “euthunasia sikon”. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya pasien menderita “gagal ginjal stadium terminal (GGT)”. Sebagaimana yang berlaku dalam penyakit stadium terminal, pasien GGT tanpa pengobatan, dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu saja akan meninggal. Kemajuan teknologi kedokteran sudah memungkinkan upaya pengobatan terhadap pasien GGT, yaitu antara lain dengan tindakan cuci darah. Namun karena mahal biaya pengobatan dengan cara cuci darah ini, yaitu sekitar 1,5 atau 2 juta rupiah setiap bulan dan harus dilakukan secara kontinu (terus-menerus), maka pasien yang kondisi ekonomi lemah tidak akan mampu melaksanakannya, dan akibatnya pasien akan meninggal.<sup>35</sup>

Dilihat dari segi penghentian pengobatan yang mengakibatkan meninggalnya pasien, maka euthunasia sikon ini mirip dengan euthunasia pasif. Perbedaannya ialah bahwa dalam euthunasia pasif, pasien dan keluarganya sudah menyerah dan pasrah, dan merekalah yang menghendaki dihentikannya pengobatan, karena diyakini pasien tersebut sudah tidak mungkin disembuhkan lagi. Akan tetapi, dalam euthunasia sikon, pasien dan keluarganya masih ingin melanjutkan pengobatan, hanya saja karena ketiadaan biaya, maka pengobatan terpaksa di hentikan.<sup>36</sup>

## 2) Euthunasia aktif

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. h. 20-21.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. h. 21-22.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. h. 22.



Euthunasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara medik melalui intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia.<sup>37</sup> Dengan perkataan lain euthunasia aktif adalah tindakan medis secara sengaja melalui obat atau cara lain sehingga menyebabkan pasien tersebut meninggal.<sup>38</sup>

Apabila seorang dokter melihat pasiennya dalam keadaan penderitaan yang sangat berat, karena penyakitnya yang sangat sulit disembuhkan, dan menurut pendapat dan perkiraannya, penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian, dan karena rasa kasihan terhadap si penderita ia melakukan penyuntikan untuk mempercepat kematiannya, maka perbuatan itu di sebut euthunasia aktif. Dalam hal ini peranan dan tindakan dokter sangat menentukan bagi mempercepat kematian si pasien, dan dia lah pelaku euthunasia tersebut.<sup>39</sup>

Euthunasia aktif menurut dr. Kartono Muhammad pernah di Indonesia, yaitu ketika seorang dokter harus memilih antara menyelamatkan seorang ibu atau bayinya yang akan lahir, pada saat diketahui bahwa proses kelahiran bayi itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa si ibu. Biasanya dalam hal ini yang dipilih adalah menyelamatkan nyawa ibu dengan mematikan nyawa bayinya. Sedangkan euthunasia aktif terhadap orang dewasa belum pernah mendengar dilakukan di Indonesia.<sup>40</sup>

Euthunasia aktif ini dapat pula dibedakan atas:

a. Euthunasia aktif langsung (direct)

Euthunasia aktif langsung adalah dilakukannya tindakan medik secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien atau memperpendek hidup pasien. Jenis euthunasia ini dikenal juga sebagai *mercy killing*.

b. Euthunasia aktif tidak langsung (indirect)

---

<sup>37</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan Edisi 4*, h. 119.

<sup>38</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, h. 146.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 18.

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. h. 18.

Euthunasia aktif tidak langsung adalah saat dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.<sup>41</sup> Contohnya adalah pemberian obat penenang dalam jumlah yang terus ditambahkan.

## 2. *Di tinjau permintaan*

Bagi pasien yang sudah sampai pada tahap terminal, tetapi pasien tersebut mengalami penderitaan yang bekepanjangan, maka seorang pasien dapat mengajukan permintaan kepada petugas medis untuk mengakhiri hidupnya. Berdasarkan kondisi ini, maka euthunasia dibedakan menjadi:

### 1) Euthunasia voluntir atau euthunasia sukarela (atas permintaan pasien)

Euthunasia yang dilakukan oleh petugas medis berdasarkan permintaan dari pasien sendiri. Permintaan dari pasien ini dilakukan dalam kondisi sadar atau dengan kata lain permintaan pasien secara sadar dan berulang-ulang, tanpa tekanan dari siapa pun juga.<sup>42</sup>

### 2) Euthunasia involuntir (tidak atas permintaan pasien)

Euthunasia tidak atas permintaan pasien adalah euthunasia yang dilakukan pada pasien yang (sudah) tidak sadar dan biasanya keluarga pasien yang meminta.<sup>43</sup> Dengan berbagai alasan, antara lain: biaya perawatan, kasihan kepada penderitaan (pasien), dan sebagainya. Pada peraktiknya, biasanya euthunasia dilakukan berdasarkan kombinasi antara berbagai jenis euthunasia tersebut.<sup>44</sup>

Ada yang melihat pelaksanaan euthunasia dari sudut lain dan membaginya atas empat kategori:

1. Tidak ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien.
2. Ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien.

---

<sup>41</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *“Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan Edisi*, h. 120.

<sup>42</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, h. 146.

<sup>43</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan Edisi 4*, h. 120.

<sup>44</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, h. 147.

3. Tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien.
4. Ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien.<sup>45</sup>

Pada umumnya disepakati batasan tentang euthanasia, yaitu:

- a. Euthanasia aktif, tindakan yang secara sengaja dilakukan dokter atau tenaga kesehatan lain untuk memperpendek hidup si pasien.
- b. Euthanasia pasif, dimana dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien.
- c. Auto-euthanasia, yaitu seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya.<sup>46</sup>

Berdasarkan batasan-batasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur dalam euthanasia, yaitu:

- a) Ada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang.
- b) Tindakan tersebut dilakukan atas dasar rasa belas kasihan, karena penyakit orang tersebut tidak mungkin dapat disembuhkan.
- c) Proses mengakhiri hidup yang dengan sendirinya berarti juga mengakhiri penderitaan tersebut dilakukan tanpa menimbulkan rasa sakit pada orang yang menderita tersebut.
- d) Pengakhiran hidup tersebut dilakukan atas permintaan orang itu sendiri atau atas permintaan keluarganya yang merasa dibebani oleh keadaan yang menguras tenaga, pikiran, perasaan dan keuangan.<sup>47</sup>

## **B. Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Menelaah aspek epistemologi, hukum Islam menurut filsafat syari'ah dapat menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kefilisafatan dan pendekatan empiris historis ilmu syariah itu sendiri. Secara empiris historis, dijumpai tiga pilar utama ilmu syariah

---

<sup>45</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan Edisi 5*, h. 150.

<sup>46</sup> Ari Yunanto & Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, h. 57-58

<sup>47</sup> Alwi Jaya, *Etika & Hukum Kesehatan*, h. 145-146

sebagai ilmu “terapan”. Tiga pilar ilmu itu ialah: filsafat ilmu syariah, metodologi ilmu syariah dan ilmu syariah atau ilmu fiqh. Satu pilar lainnya ialah ilmu syariah “terapan” yaitu *al-siyasah al-syari’iyah*.<sup>48</sup>

Marcus Tullius Cicero (romawi) dalam *De Legibus* menyatakan hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu Syari’ah, fiqh, hukum syara’, dan qanun.<sup>49</sup>

Syari’ah dalam arti luas merujuk kepada himpunan norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Dengan demikian, syari’ah dalam arti luas ini meliputi dua aspek agama Islam yaitu akidah dan amaliah. Dari aspek amaliah disebut juga syariah yang dalam arti sempit merujuk kepada himpunan norma yang bersumber kepada wahyu Ilahi yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya secara konkret. Syariah dalam arti sempit inilah yang biasa disebut hukum, yaitu hukum Islam.<sup>50</sup>

Fiqh istilah lain dari hukum Islam. ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam al-qur’an dan sunah Nabi Muhammad saw. yang direkam dalam kitab-kitab hadis.<sup>51</sup> Hukum syara’ merujuk kepada satuan norma atau kaidah. Himpunan norma atau hukum syara’ ini membentuk syariat atau fiqh. Norma atau hukum syara’ yang membentuk syariah atau fiqh ini meliputi baik norma-norma taqlifi seperti wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram; maupun meliputi norma-norma wad’i seperti sebab (akad merupakan sebab terjadinya perpindahan milikatas suatu

---

<sup>48</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Pranata Group, 2010), h. 23.

<sup>49</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.

<sup>50</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, h. 1.

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam (pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, h. 4.

barang yang diperjualbelikan), syarat (milik sendiri adalah syarat untuk sahnya wakaf), dan penghalang (delik pembunuhan menjadi penghalang bagi pelakunya untuk mendapatkan warisan atau wasiat dari pewaris atau pemberi wasiat yang dibunuhnya).<sup>52</sup>

Qanun menggambarkan bagian dari syariah yang telah dipositivisasi dan diintegrasikan oleh pemerintah menjadi hukum negara. Qanun merujuk kepada berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di negeri muslim dalam rangka pelaksanaan syariah dan mengisi kekosongan serta melengkapi syariah. Tindakan ini disebut siyasah syar'iyah. Istilah-istilah ini memperlihatkan strategi dan taktik hukum Islam untuk terus berevolusi mengikuti perkembangan dan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan ciri esensialnya sebagai hukum yang berdimensi dan bersumber Ilahi. Hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku di dalam berbagai masyarakat muslim.<sup>53</sup>

## **2. Sumber Hukum Islam**

Dalam kepustakaan Hukum Islam di Indonesia, sumber Hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau asa hukum Islam atau dasar hukum Islam. Allah swt telah menentukan sendiri sumber hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Adapun sumber hukum Islam adalah Al-qur'an, Al-hadis, dan Ar-ra'yu (penalaran). Perkataan Allah berasal dari kata kerja qaraa yang artinya dia telah membaca. Kata kerja ini berubah menjadi kata benda qur'an, yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Makna perkataan itu sangat erat hubungannya dengan arti Al-qur'an yang pertama diturunkan di Gua Hira yang dimulai dari perkataan iqra' artinya bacalah. Membaca adalah salah satu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan itu hanya dapat hanya dapat diperoleh dan dikembangkan dengan jalan membaca dalam arti kata seluas-luasnya. Nama Al-qur'an bermacam-macam, seperti yang disebutkannya sendiri dan masing-masing mengandung arti dan makna tertentu, antara lain:

---

<sup>52</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, h. 3.

<sup>53</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, h. 3.



1. Al-Kitab, artinya buku atau tulisan. Pengertian yang dimaksud, untuk mengingatkan kaum muslimin supaya membukukannya menjadi buku.
2. Al-Qur'an, artinya bacaan. Pengertian dimaksud, mengingatkan supaya ia dipelihara/dihafal bacaannya di luar kepala.
3. Al-furqan, artinya pemisah. Pengertian dimaksud, mengingatkan supaya dalam mencari garis pemisah antara kebenaran dan kebatilan, yang baik dan buruk haruslah dari padanya atau mempunyai rujukan padanya.
4. Hudan, yaitu petunjuk. Pengertian dimaksud, mengingatkan bahwa petunjuk tentang kebenaran yang hanyalah petunjuk yang diberikannya atau mempunyai rujukan kepadanya
5. Az-Zikr, artinya ingat. Pengertian yang dimaksud, menunjukkan bahwa ia berisikan peringatan sehingga selalu diingat tuntunannya dalam melakukan setiap tindakan.<sup>54</sup>

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu Ilahi yang menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keragu-raguan di dalamnya. Selain itu, Al-Qur'an menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia menjadi bertaqwa (predikat tertinggi di hadapan Allah) kepada Allah swt. Oleh karena itu, Al-Qur'an banyak mengemukakan prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah swt, meskipun kegiatan muamalah terjadi secara interaktif antara sesama makhluk, termasuk alam semesta. Namun Al-qur'an dan Al-hadis tetap menjadi sumber hukum dasar yang harus dipedomani oleh manusia berdasarkan prinsip bahwa semua kegiatan itu berada dalam kegiatan beribadah kepada Allah swt. Dengan demikian, semua perbuatan manusia adalah ibadah kepada Allah swt sehingga tidak boleh bertentangan dengan hukum-nya, dan ditujukan untuk mencapai keridhaannya.

Al-Qur'an sebagai pedoman yang abadi bagi kehidupan manusia mempunyai tiga jenis petunjuk, yaitu sebagai berikut.

Pertama, ajaran yang di dalamnya memberi pengetahuan tentang struktur kenyataan dan posisi manusia. Ajaran dimaksud berisi petunjuk akhlak atau moral serta hukum atau

---

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 24.



syariat, yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Ajaran itu juga mengandung metafisika tentang Tuhan, kosmologi tentang alam semesta serta kedudukan berbagai makhluk dan benda di dalamnya, dan membicarakan kehidupan di akhirat. Selain itu, mengandung ajaran tentang kehidupan manusia, tentang sejarah dan eksistensi manusia serta arti dari keduanya. Ia mengandung segala pelajaran yang diperlukan oleh manusia untuk mengetahui siapa dirinya, di mana ia berada dan ke mana ia pergi. Karena Al-Qur'an adalah dasar dan hukum Tuhan dan pengetahuan metafisika.

Kedua, Al-Qur'an berisi petunjuk yang menyerupai ringkasan sejarah manusia baik rakyat biasa, raja, orang-orang suci, maupun Nabi dan Rasul Allah swt sepanjang zaman yang mereka ditimpa cobaan. Walaupun petunjuk itu dalam bentuk sejarah, tetapi ditujukan kepada manusia. Petunjuk dimaksud, diturunkan kepada manusia dimasa lalu, kini dan akan datang, meskipun mengambil tempat dan waktu yang telah lalu. Para pendusta yang mendustakan kebenaran Al-qur'an dan agama Islam selalu ada pada setiap saat, begitu pula mereka yang mengingkari Tuhan ataupun mereka yang berada di jalan lurus. Mereka yang diberi siksanya dan mereka yang diberikan karunianya selalu ada pada setiap ruang dan waktu. Jadi, Al-qur'an adalah petunjuk tentang kehidupan manusia yang dimulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian, dimulai darinya dan kembali kepadanya.

Ketiga, Al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit dijelaskan dalam bentuk bahasa biasa. Ayat-ayat Al-qur'an berasal dari Firman Allah Swt, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang kita pelajari dalam Al-Qur'an secara Rasional. Ayat-ayat itu mempunyai kekuatan untuk melindungi manusia. Itulah sebabnya kehadiran fisik Al-qur'an sendiri membawa berkat bagi manusia. Apabila seorang muslim menghadapi kesulitan, ia membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur'an untuk menenangkan dan menghibur hatinya. Menurut ajaran Islam, membaca Al-Qur'an adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dan merupakan ibadah.<sup>55</sup>

Menurut Syaminan Zaini, Al-Qur'an mengandung dua macam hukum, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 26.

1. Sunnatullah (hukum alam). Hukum ini berlaku untuk benda fisik. Benda-benda fisik ini sangat patuh kepada hukum tersebut. Seperti Allah memerintahkan kita menyerahkan diri dan bersujud kepadanya.
2. Dinullah (hukum agama). Hukum ini berlaku bagi manusia sebagai makhluk rohani. Hukum ini terbagi kepada tiga bagian, yaitu aqidah (kepercayaan), syari'ah (hukum ibadah dan muamalah) dan akhlak (hukum budi pekerti). Dalam Islam hukum ini telah diperinci sedemikian rupa, yang mencakup keseluruhan aspek kemanusiaan dan kehidupannya.<sup>56</sup>

Hadist merupakan sumber hukum Islam yang kedua, Al-hadis adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun hanya sekali saja beliau mengerjakannya sepanjang hidupnya, dan walaupun hanya seorang saja yang meriwayatkannya.

Menurut rumusan ulama ushul fiqh, Al-Hadis ialah segala yang dipindahkan dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan maupun taqirir yang mempunyai kaitan dengan hukum. Pengertian inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi: “sungguh telah kutinggalkan untukmu dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.”<sup>57</sup>

Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu Ar-Ra'yu (penalaran) adalah penginterpretasian ayat Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang bersifat umum. Dari interpretasi asas-asas hukum yang bersifat umum itulah, sehingga seseorang dan/atau beberapa orang dapat mengeluarkan (mengistimbatkan) asas-asas hukum yang terperinci. Kata Ar-Ra'yu berasal dari bahasa arab yang akar katanya adalah ra'a yang berarti melihat. Oleh karena itu, Ar-Ra'yu berarti penglihatan. Penglihatan disini adalah penglihatan akal, bukan penglihatan mata, meskipun penglihatan mata seringkali sebagai alat bantu terbentuknya penglihatan akal, sebagaimana halnya pendengaran, perabaan, perasaan, dan sebagainya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 31.

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 32.

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 37.

Interpretasi atau penalaran terbentuk sebagai hasil suatu proses yang terjadi pada otak manusia setelah terlebih dahulu memperoleh masukan. Masukan yang dimaksud dapat terjadi pada saat sebelum dan sesudah terjadi proses pemikiran karena sering terjadi bahwa hasil interpretasi ini sangat tergantung pada jumlah masukan yang dimiliki oleh seseorang yang melahirkan suatu kesimpulan. Proses itu mempunyai teknik dan bentuk intepretasi yang akan diuraikan sebagai berikut:

Ijtihad adalah bentuk penalaran sesudah Qur'an dan Sunnah. Ijtihad berasal dari akar kata *ijtihada* yang secara etimologinya berarti mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menetapkan hukum Islam. ijtihad ialah perincian ajaran Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Al-hadis yang bersifat umum dan orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukannya disebut *mujtahid*. Ijtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari masa ke masa karena masyarakat Islam selalu berkembang sehingga senantiasa muncul masalah yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya. Ijtihad dilihat dari pelaksanaannya dalam mengantisipasi ruang lingkup permasalahan yang muncul dan orang-orang yang ikut mengistinbatkan hukum dalam menyelesaikan persoalan dapat disebut *ijtihad fardi* dan *ijtihad jam'i*. Ijtihad fardi adalah setiap orang yang melakukan ijtihad yang kemudian mendapat persetujuan dari beberapa orang mujtahid disebut ijtihad yang bersifat regional. Sedangkan ijtihad jam'i adalah setiap ijtihad yang dilaksanakan oleh seseorang yang kemudian mendapat persetujuan dari seluruh orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad pada suatu negara disebut ijtihad yang bersifat nasional.<sup>59</sup>

Ijma' adalah kebulatan mendapat fuqaha mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad saw. berdasarkan pengertian ijma' dapat diambil kesimpulan bahwa mungkin tidak akan terjadi ijma' sampai dunia kiamat karena kesepakatan ulama Indonesia mengenai sesuatu hukum dalam suatu kasus amat bermasalah sebagai akibat perbedaan sudut pandang dan disiplin ilmu serta pengaruh budaya

---

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 38-39.

yang masing-masing melatarbelakanginya. Namun, bila hal itu mampu diwujudkan oleh ulama mujtahidin atas adanya usaha-usaha organisasi umat Islam sedunia, hal itu merupakan salah satu bentuk dan teknis dalam menentukan hukum Islam.<sup>60</sup>

Qiyas secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan. Qiyas secara terminologi adalah menyamakan masalah baru yang yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad berdasarkan atas adanya persamaan *illat* hukum. Oleh karena itu, mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya disebut qiyas.<sup>61</sup> Istilah qiyas menurut para ahli hukum Islam, berarti penyimpulan analogis yakni kesimpulan sebuah prinsip asal yang masuk ke dalam suatu yang lebih dahulu, bahwa kasus yang berlangsung sama dengan prinsip itu atau mirip dengan yang lebih dahulu itu dalam kekuatan gambaran esensi umum yang disebut sebagai unsur penyebab (*illah*). Selanjutnya dalam pemikiran Islam istilah yang sama itu disebut sebagai penyimpulan silogisme atau silogistik. Unsur umum pada kedua penggunaan itu merupakan pengembangan pemikiran yang berasal dari pengenalan secara eksplisit ke arah tidak mengenal secara eksplisit. Istilah itu, sebagaimana dirumuskan secara sadar, boleh jadi sebagian besar memperlihatkan pengaruh luar, namun doktrin itu sendiri menunjukkan pengembangan internal yang konsisten dan tidak dapat disalahkan. Penyimpulan analogis secara sadar pada generasi terdahulu disebut kebijaksanaan pribadi atau pendapat pribadi yang dipertimbangkan (*ra'yu*).<sup>62</sup>

Maslahat mursalah adalah memperhatikan kepentingan masyarakat atau memelihara tujuan hukum Islam, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat. oleh karena itu, maslahat mursalah adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara', baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Maslahat mursalah tidak akan dapat diartikan mengubah ketentuan hukum Alqur'an atau Sunnah Nabi Muhammad saw. sebab,

---

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 39-40.

<sup>61</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 40-41.

<sup>62</sup> Fazlur Rachman, *Islam* (Cet. 2; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992), h. 111

masalah mursalah hanya tertuju kepada hal-hal yang tidak mempunyai ketentuan hukum, baik di dalam Alqur'an maupu Sunnah Nabi Muhammad saw.<sup>63</sup>

Sadduz zari'ah ialah menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan.

Istihsan secara etimologi berarti memandang sesuatu baik. Sedangkan menurut istilah, istihsan berarti memandang lebih baik meninggalkan ketentuan dalil yang bersifat khusus untuk mengamalkan ketentuan dalil yang bersifat umum yang dipandang lebih kuat. Hal ini berarti mengecualikan hukum kepada sesuatu peristiwa dari hukum peristiwa dan memberikan kepadanya hukum yang lain yang sejenisnya. Pengecualian yang dimaksud dilakukan karena adanya dasar yang kuat.

Istishshab adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat suatu dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.

Urf adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun-temurun diberlakukannya di dalam masyarakat.<sup>64</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

---

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 41.

<sup>64</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 43.



### **BAB III**

## **EUTHUNASIA DALAM KODE ETIK KEDOKTERAN DAN HUKUM KESEHATAN**

### ***A. Euthunasia Dalam Etik Kedokteran***

Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia yaitu berusaha mempertahankan supaya tubuh pasien tetap sehat atau berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien, atau setidaknya-tidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien. Oleh karenanya dengan alasan yang demikian wajarlah apabila apa yang dilakukan oleh dokter itu layak untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai batas-batas tertentu. Sampai batas mana perbuatan dokter itu dapat dilindungi oleh hukum, inilah yang menjadi permasalahan. Mengetahui batas tindakan yang diperbolehkan menurut hukum, merupakan hal yang sangat penting, baik bagi dokter itu sendiri maupun bagi pasien dan aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Etika tidak dapat dipisahkan dari profesi, karena etika merupakan perwujudan dari ciri-ciri profesi yang menyangkut tanggung jawab keahlian kepada masyarakat. Dengan kata lain, ciri-ciri suatu profesi terwujud dalam asosiasi-asosiasi dan kode etik.<sup>2</sup> Kode etik adalah pernyataan formal dan ideal dari nilai kelompok, kode etik adalah satu set prinsip etika yang disharingkan oleh anggota kelompok, merefleksi keputusan moral mereka sepanjang waktu, dan melayani sesuai dengan standar profesional. Kode etik menunjukkan bahwa tanggung jawab dan kepercayaan pada masyarakat lebih diterima oleh profesi. Apabila seseorang anggota melanggar kode etik profesi, organisasi profesi dapat memberi sanksi atau mengeluarkan anggota

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan* (Cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 23

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 22.



tersebut.<sup>3</sup> Ruang lingkup kewajiban bagi anggota profesi atau “isi” kode etik profesi pada umumnya yaitu:

- a. Kewajiban umum
- b. Kewajiban terhadap “client”
- c. Kewajiban terhadap teman sejawatnya
- d. Kewajiban terhadap diri sendiri

Etika terikat dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berlangsung dalam ruang dan waktu. Hal ini jelas terlihat sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/ Menkes/ SK/ III/ 1982 tentang Sistem Kesehatan Nasional, untuk selanjutnya hal ini dipertegas lagi dalam Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa dalam banyak hal telah terjadi perubahan orientasi mengenai pemikiran dan pendekatan dalam pelayanan kesehatan. Itu sebabnya garis pemisah antara etika dan hukum tidak jelas, karena dari waktu ke waktu selalu bergerak mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti yang dikatakan Koeswadji bahwa “norma etika umum masyarakat dengan norma etika kesehatan kedokteran saling mempengaruhi atau dengan kata lain perkataan, nilai dan pandangan hidup yang dicerminkan oleh etika profesi kesehatan kedokteran dalam suatu masyarakat tertentu berlaku untuk suatu waktu tertentu”.<sup>4</sup>

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa etika profesi merupakan sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam pengembangan profesi. Hanya pengembangan profesi itu sendiri yang dapat mengetahui tentang

---

<sup>3</sup> Jenny Marlindawani Purba & Sri Endang Pujiastuti, *Dilema Etik Dan Pengambilan Keputusan Etis Dalam Praktik Keperawatan Jiwa* (Cet. 1; Jakarta: EGC, 2009), h. 46.

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan*, h. 27

perilakunya dalam pengemban profesi apakah sudah memenuhi tuntutan etika atau tidak. Ini berarti kepatuhan pada etika profesi sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Di samping itu, sikap dan tata nilai profesional merupakan ciri dan pengakuan masyarakat terhadap eksistensi profesi dalam pembangunan tatanan kehidupan masyarakat, sehingga tata nilai profesi ini bersangkut-paut dan terikat erat dengan nilai humanisme atau kemanusiaan. Hal ini terlihat pada salah satu ciri dari profesi dokter yakni nilai kemanusiaan. Naluri seorang dokter akan terpanggil tidak hanya terbatas pada upayanya bagaimana ia dapat memberi pelayanan langsung terhadap penderitaan dalam membantu memecahkan masalah kesehatan, tetapi juga seorang dokter berupaya mengembangkan nilai-nilai profesionalismenya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan untuk kepentingan kemanusiaan.<sup>5</sup>

Agar setiap profesi kesehatan senantiasa berpegang teguh dan berperilaku sesuai dengan kehormatan profesinya, maka sebelum menjalankan tugas profesinya diwajibkan mengangkat sumpah, sebagai janji profesi.<sup>6</sup> Demikian pula halnya dengan profesi kedokteran, sejak awal sejarah umat manusia telah mengakui adanya beberapa sifat yang fundamental yang melekat secara mutlak pada diri setiap dokter yang baik dan bijaksana yaitu kemurnian niat, kesungguhan dalam bekerja, kerendahan hati, serta integritas ilmiah dan sosial. Oleh karenanya para dokter di seluruh dunia berdasar pada prinsip dan disiplin kedokteran dalam suatu etik profesional yang dikenal kode etik kedokteran. Kode etik kedokteran ini didasarkan atas asas-asas etik yang mengatur hubungan antar manusia pada umumnya, serta memiliki akar-akarnya

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan*, h. 27-28

<sup>6</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, h. 39.

dalam filsafat masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus dalam masyarakat itu.<sup>7</sup>

Hakikat profesi kedokteran adalah bisikan nurani dan panggilan jiwa untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan berdasarkan moralitas yang kental. Prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, kepedulian kepada sesama dalam rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang, dan ikut merasakan penderitaan orang lain yang kurang beruntung. Dengan demikian seorang dokter tidak boleh egois melainkan harus mengutamakan kepentingan orang lain, membantu mengobati orang sakit. Adapun prinsip umum dalam etik kedokteran yaitu:

#### 1. Menghormati otonomi

- a. Menghormati otonomi berarti bahwa seorang pasien yang mampu menalar pilihan pribadinya harus diperlakukan dengan menghormati kemampuannya dalam mengambil keputusan mandiri. Dalam prinsip ini erat kaitannya dengan persetujuan tindakan kedokteran.
- b. Melindungi seseorang yang otonominya kurang atau terganggu yang berarti bahwa seorang pasien yang ketergantungan seperti anak-anak.

#### 2. Berbuat baik

Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban membantu orang lain dengan mengupayakan manfaat maksimal sambil meminimalkan risiko.

#### 3. Tidak merugikan

Prinsip ini menyatakan bahwa jika tidak dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat maka setidaknya jangan merugikan orang lain.

#### 4. Keadilan

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 22-23.

- a. Prinsip ini mengacu pada kewajiban memperlakukan setiap orang sama dalam memperoleh haknya dalam pelayanan kesehatan, tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, perbedaan kelamin (*gender*), politik atau kedudukan sosial (tidak deskriminatif).
- b. Keadilan distributif, proporsional antara beban (termasuk biaya) dan resiko dengan manfaat.<sup>8</sup>

Dilihat dari sejarahnya, sebagaimana dikemukakan oleh Sri Umiyati yang dikutip oleh Imran Halimy, norma-norma etik kedokteran telah dipakai sejak adanya orang di dalam masyarakat yang mempunyai tugas mengobati orang sakit. Meskipun tidak tertulis, norma-norma ini menggariskan kelakuan orang yang mengobati pasiennya. Di antara norma-norma ini yang tertua adalah sumpah dokter Hindu yang tertulis pada tahun 1500 SM. Di antara tema yang terpenting yang tercantum dalam sumpah ini adalah “jangan merugikan penderita yang sedang diobati”.

Seribu tahun kemudian barulah dikeluarkan “Sumpah Hipokrates” yang sangat terkenal, menyatakan bahwa seorang dokter pertama-tama harus mengutamakan kepentingan penderita. Sumpah Hipokrates ini akhirnya dijadikan landasan dan memberikan inspirasi dasar bagi suatu kode etik internasional yang kemudian dirumuskan kembali dalam pernyataan Himpunan Dokter se-Dunia di Landon pada bulan Oktober 1949. Rumusan ini kemudian diperbaiki lagi oleh Sidang ke-22 Himpunan Dokter tersebut di Sydney pada bulan Agustus 1968.

Menurut para ahli sejarah belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hippokrates sendiri, tapi setidaknya-tidaknya berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan dari dokter yunani. Walaupun

---

<sup>8</sup> M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, h. 3-4.

mempunyai riwayat eksistensi yang sudah panjang, namun belum pernah dalam sejarah kode etik menjadi fenomena yang begitu banyak dipraktekkan dan tersebar begitu luas seperti sekarang ini. Jika sungguh benar zaman kita diwarnai suasana etis yang khusus, salah satu buktinya adalah peranan dan dampak kode-kode etik ini.<sup>9</sup>

Berdasarkan kode etik kedokteran internasional, maka disusun kode etik Kedokteran Nasional, sesuai dengan inspirasi dan budaya bangsa itu sendiri. Di Indonesia, kode etik kedokteran ini kemudian disusun dan dibahas oleh panitia redaksi Musyawarah Kerja Susila Kedokteran Nasional yang selanjutnya dijadikan landasan bagi setiap dokter di Indonesia dan dinyatakan berlaku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang pernyataan berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia tertanggal 23 Oktober 1969. Naskah Kode Etik Kedokteran ini kemudian disempurnakan dalam Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II tahun 1981 dan disempurnakan lagi dalam musyawarah Kerja Nasional Ikatan Dokter Indonesia ke-13 tahun 1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia terdiri atas empat bab. Bab I mengenai kewajiban umum, Bab II mengenai kewajiban dokter terhadap pasien, Bab III mengenai kewajiban dokter terhadap teman sejawat, dan Bab IV mengenai kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Fokus pembahasan mengenai kewajiban dokter terhadap pasien pada Bab II terdapat pada pasal 9 yang berbunyi: “seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani”. Pasal ini direvisi dalam penerapan Kode Etik kedokteran Indonesia menjadi pasal 7d Bab I tentang kewajiban Umum dengan redaksi yang sama (tidak berubah).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> K. Bertens, *Etika* (Cet. 10; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.280

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 24-25.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa segala perbuatan dokter terhadap pasien bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan sendirinya, ia harus mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Kadang-kadang, dokter terpaksa harus melakukan operasi atau cara pengobatan tertentu yang membahayakan. Hal ini dapat dilakukan asal tindakan ini diambil setelah mempertimbangkan masak-masak bahwa tidak ada jalan/cara lain untuk menyelamatkan jiwa selain pembedahan. Sebelum operasi dimulai, perlu dibuat persetujuan tertulis lebih dahulu dari pasien atau dari keluarganya (Persetujuan Tindakan Kedokteran, PTK). Sesuai peraturan Menteri Kesehatan tentang PTK persetujuan diberikan pada pasien yang kompeten atau keluarga terdekat. Ditinjau dari usia, menurut manual PTK dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tahun 2006, seseorang dianggap kompeten apabila telah berusia 18 tahun (UU Perlindungan Anak Tahun 2002) atau telah pernah menikah dan menurut KUHPerdata telah berusia 21 tahun.<sup>11</sup>

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia yang pasti pada suatu waktu akan menemui ajalnya. Tidak seorang dokter pun, betapapun pintarnya akan dapat mencegahnya. Naluri yang terkuat pada setiap makhluk bernyawa, termasuk manusia ialah mempertahankan hidupnya. Untuk itu, manusia diberi akal, kemampuan berfikir dan mengumpulkan pengalamannya sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan usaha untuk menghindarkan diri dari bahaya maut. Semua usaha tersebut merupakan tugas seorang dokter. Ia harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani. Ini berarti bahwa baik menurut agama, Undang-Undang Negara, maupun Etika Kedokteran, seorang dokter tidak

---

<sup>11</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, h. 25.



memperbolehkan melakukan seperti menggugurkan kandungan dan mengakhiri hidup seorang pasien.<sup>12</sup>

Setiap dokter di mana pun ia berada berkewajiban untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Ini berarti bahwa bagaimana pun kondisi dan gawatnya seorang pasien, setiap dokter harus melindungi dan mempertahankan hidup pasien tersebut. Meskipun dalam keadaan demikian si pasien sebenarnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi atau sudah dalam keadaan sekarat berbulan-bulan lamanya, namun seorang dokter tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban untuk selalu melindungi hidupnya. Meskipun kadang-kadang ia terpaksa melakukan suatu tindakan medis yang sangat membahayakan namun hal itu dilakukan setelah dipertimbangkan secara mendalam bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan pasien dari ancaman maut selain tindakan tersebut. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa betapa pun gawatnya dan menderitanya seorang pasien, seorang dokter tetap tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang berakibat mengakhiri hidup atau mempercepat kematian pasien tersebut.<sup>13</sup>

Dari uraian tersebut dapat diambil intisari bahwa tindakan euthunasia bertentangan dengan etik kedokteran. Dengan memperhatikan maksud dari pasal 9 tersebut, maka seorang dokter yang menghadapi seorang pasien yang mengalami koma berkepanjangan, tidak diperkenankan memberikan suntikan yang mempercepat kematiannya meskipun ada permintaan dari pihak keluarganya. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari pasal 9 versi sebelum revisi: “Tuhan seru sekalian menciptakan manusia dan menentukan bahwa ciptaan-Nya itu pada suatu waktu akan

---

<sup>12</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, h. 25.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 25.

memenuhi ajalnya. Tidak seorang dokter yang betapapun pintarnya akan dapat mencegahnya. Naluri yang terkuat pada makhluk bernyawa, termasuk manusia ialah mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diberi akal, kemanapun berfikir dan mengumpulkan pengalamannya. Dengan demikian membangun dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan menghindarkan diri dari bahaya maut. Ini semuanya adalah termasuk tugas seorang dokter. Ia harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani. Ini berarti bahwa ia, menurut etik kedokteran tidak dibolehkan untuk:

- a. Menggugurkan kandungan (abortus provocatus)
- b. Mengakhiri hidup seorang pasien yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (etanasia).<sup>14</sup>

Tindakan euthunasia yang dianggap bertentangan dengan etika kedokteran tersebut di atas adalah euthunasi aktif. Sedangkan euthunasia pasif dapat diungkap oleh pemikir Hipokrates yang dikemukakan oleh Imron Halimy antara lain: “Ilmu kedokteran adalah upaya mengurangi penderitaan si sakit, menyingkirkan penyakit dan tidak mengobati kasus yang tidak memerlukan pengobatan”.

Dari ungkapan tersebut dapat dikemukakan bahwa dokter dianjurkan untuk tidak mengobati kasus-kasus yang seharusnya memang tidak perlu diobati. Ini mengandung arti bahwa sebaiknya dokter tidak berupaya mengobati kasus-kasus yang tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Dengan demikian, dalam menghadapi kasus-kasus penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Hipokrates menganut Euthanasia yang pasif. Ia tidak bersedia secara aktif mengusahakan agar penderitaan

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 26-27.

pasiennya dihentikan melalui kematian, namun ia juga tidak akan berupaya lagi untuk mengobati dan menyembuhkannya.<sup>15</sup>

Di Indonesia, para dokter menganut upaya euthanasia aktif, bahkan mereka sudah melaksanakannya walaupun kadang-kadang tidak secara langsung. Misalnya keluarga pasien sering meminta dengan paksa agar si pasien dikeluarkan dari rumah sakit. Prosedur permohonan semacam ini memang ada dan pihak rumah sakit tidak dapat menolak atau menahannya, sehingga si pasien keluar dari rumah sakit dan dokter pun diperkenankan melepas tanggung jawabnya. Dalam keadaan demikian sebenarnya baik dokter maupun keluarga pasien mengetahui dan menyadari bahwa si pasien akan meninggal apabila perawatannya berhenti. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa etik kedokteran Indonesia tidak membolehkan dilakukannya euthanasia aktif dan kelihatannya membolehkan euthanasia pasif dalam menghadapi pasien yang menurut perkiraan berdasarkan ilmu kedokteran sudah tidak mungkin disembuhkan lagi.<sup>16</sup>

### ***B. Hukum Kesehatan***

Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Pergaulan hidup atau hidup dimasyarakat yang sudah maju seperti sekarang ini tidak cukup hanya dengan adat kebiasaan yang turun temurun seperti sebelum lahirnya peradaban yang modern. Untuk itu, maka oleh kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat atau negara diperlukan aturan-aturan yang secara tertulis yang disebut hukum. Peraturan-

---

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 26-27.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 28.

peraturan yang diatur seperti yang terdapat dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum tatanegara, dan hukum administrasi negara. Meskipun demikian, tidak semua perilaku masyarakat atau hubungan antara satu dengan yang lainnya juga masih perlu diatur oleh hukum yang tertulis seperti etika, adat-istiadat, tradisi, kepercayaan dan sebagainya.<sup>17</sup>

Dalam lebih dari tiga dekade terakhir, disiplin hukum memasuki wilayah kedokteran atau dapat dikatakan kalangan kesehatan makin akrab dengan bidang dan pengetahuan hukum. Pada awalnya berkembang dalam wilayahnya masing-masing, kesehatan dalam mengatasi masalah kesehatan yang timbul pada anggota masyarakat, dan hukum mengatur tentang ketertiban dan keamanan, keadilan dan ketentraman hidup bermasyarakat. dalam proses penegakan hukum, peran dokter diperlukan oleh jajaran penegak hukum untuk memeriksa korban tindak pidana dan melaporkan hasil pemeriksaan dalam bentuk *visum et repertum* yang berguna sebagai alat bukti dalam penyelidikan, penuntutan dan pemutusan perkara oleh hakim. Ilmu ini dikembangkan menjadi salah satu cabang ilmu kedokteran yang dikenal sebagai ilmu kedokteran forensik. Sebaliknya, dalam perkembangan dan peningkatan upaya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan diperlukan pula pengetahuan dan aturan hukum yang disebut sebagai hukum kesehatan dan ini merupakan cabang ilmu hukum.<sup>18</sup>

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. dengan

---

<sup>17</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, h. 43.

<sup>18</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, h. 6.

sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat. hukum kesehatan relatif masih muda bila dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain.<sup>19</sup>

Pada masa kini, dokter dan tenaga kerja kesehatan makin menyadari perlunya memahami dan melaksanakan profesi tidak saja berdasarkan etika profesi, tetapi juga menyesuaikannya dengan berbagai aspek hukum dalam pelayanan dan pemeliharaan kesehatan. Telah begitu banyak ketentuan hukum dan peraturan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Kesehatan dan lain-lain yang sudah diterbitkan yang berkaitan dengan hukum kesehatan selain dari ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dan KUHPerdara.

Hukum kesehatan merupakan cabang ilmu hukum, perkembangannya dimulai pada waktu *Word Congress On Medical Law* di Belgia pada tahun 1967 dan diteruskan secara periodik untuk beberapa lama. Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan dimulai sejak terbentuknya kelompok studi untuk hukum kedokteran UI/RS Ciptomangunkusumo di Jakarta pada tahun 1982.

Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI) terbentuknya di Jakarta pada tahun 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) pada kongres I PERHUKI di Jakarta pada tahun 1987. PERHUKI wilayah Sumatera Utara terbentuk pada tanggal 14 April 1986 di Medan.<sup>20</sup>

Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) adalah semua ketentua hukum yang berhubunga langsung

---

<sup>19</sup> Rahman Syamsuddin dan Amiruddin Pabbu, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan* (Cet. 1; Toddopuli Makasar: Kedai Aksara, 2012), h. 106

<sup>20</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, h. 6-7.

dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapan hak dan kewajiban, baik secara perseorangan maupun segenap lapisan masyarakat, baik secara penerima pelayanan kesehatan dalam segala aspek, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lain.

Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan yaitu menyangkut pelayanan kedokteran (*medical care/service*). Hukum kesehatan mencakup komponen hukum kesehatan yang lain adalah hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat, hukum kesehatan lingkungan dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Etika dan Hukum mempunyai mempunyai banyak persamaan, yaitu:

1. Etika dan hukum kesehatan sama-sama merupakan alat untuk mengatur terbitnya hidup bermasyarakat dalam bidang kesehatan.
2. Sebagai objeknya adalah sama yakni masyarakat baik yang sakit maupun yang tidak sakit(sehat).
3. Masing-masing mengatur kedua belah pihak antara hak dan kewajiban, baik pihak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan maupun yang menerima pelayanan kesehatan agar tidak saling merugikan.
4. Keduanya menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi, baik penyelenggara maupun penerima pelayanan kesehatan.
5. Baik etika maupun hukum kesehatan merupakan hasil pemikiran dari para pakar serta pengalaman para praktisi bidang kesehatan.

Sedangkan perbedaan antara etika kesehatan dan hukum kesehatan, antara lain:

---

<sup>21</sup> M. Jusuf Hanafiah Dan Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, h. 7.



- a. etika kesehatan hanya berlaku di lingkungan masing-masing profesi kesehatan, sedangkan hukum kesehatan berlaku untuk umum.
- b. Etika kesehatan disusun berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing profesi, sedangkan hukum kesehatan disusun oleh badan pemerintahan, baik legislatif (Undang-undang=UU, Peraturan Daerah=Perda) maupun oleh eksekutif (Peraturan Pemerintah/PP, Kepres.Kepmen, dan sebagainya).
- c. Etika kesehatan tidak semuanya tertulis, sedangkan hukum kesehatan tercantum atau tertulis secara rinci dalam kitab undang-undang atau lembaran negara lainnya.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran etika kesehatan berupa tuntutan, biasanya dari organisasi profesi, sedangkan sanksi pelanggaran hukum kesehatan adalah “tuntutan”, yang berujung pada pidana dan hukuman.
- e. Pelanggaran etika kesehatan diselesaikan oleh majelis kehormatan Etik Profesi dari masing-masing organisasi profesi, sedangkan pelanggaran hukum kesehatan diselesaikan lewat pengadilan.
- f. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, sedangkan untuk pelanggaran hukum pembuktiannya memerlukan bukti fisik.<sup>22</sup>

Hukum yang terkait dengan aturan legal, yang dibuat untuk kepentingan atau melindungi kesehatan masyarakat di Indonesia mencakup:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang tentang Kesehatan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, h.44-45.

Yaitu UU Pokok Kesehatan No. 9 Tahun 1960; UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 direvisi menjadi UU No. 36 Tahun 2009.

3. Peraturan Pemerintah
4. Keputusan Presiden
5. Keputusan Menteri Kesehatan
6. Keputusan Dirjen/Sekjen
7. Keputusan Direktur/Kepala Pusat
8. Dan Seterusnya<sup>23</sup>

Proses kematian dini baik yang dikehendaki oleh si penderita (yang menderita sakit) maupun yang tidak dikehendaki dalam hubungannya dengan seseorang yang seharusnya mendapatkan perawatan dokter akan menjadi tidak sederhana. Hal ini didasarkan pada:

- a. Dokter dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya wajib berusaha untuk menyembuhkan atau minimal meredam rasa sakit pasien, sementara bagi si pasien ia berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan terbaik sesuai dengan derajat kemanusiaannya.
- b. Bahwa antara dokter dan pasien mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (pasal 27 UUD 1945) (UUD Negera RI).<sup>24</sup>

Dalam proses kematian euthanasia dalam hubungannya dengan seorang (pasien) yang seharusnya mendapatkan dan dalam keadaan atau sedang dalam perawatan dokter, sebetulnya di dalamnya telah terjadi “sebuah pembunuhan yang didasarkan pada rasa belas kasihan” atau “membunuh demi kebaikan” yang dalam

---

<sup>23</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, h. 46.

<sup>24</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Cet. 2; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 151

istilah asing disebut *Mercy Killing*. Pembunuhan jenis ini biasanya timbul dikarenakan situasi dan kondisi si pasien yang apabila penyakitnya diprediksi tidak akan kunjung sembuh.

Kemudian dalam hal terwujudnya atau terlaksanya jenis pembunuhan ini (euthanasia) ada beberapa pihak yang mempunyai andil di dalamnya yaitu di antaranya adalah dokter, perawat, pasien, keluarga pasien dan pihak ketiga yang mempunyai kaitan langsung dengan proses penyembuhan seorang pasien atau bahkan si pasien sendiri yang melakukannya. Untuk yang dimaksud dengan pihak ketiga ini dapat dialamatkan bagi petugas apotek yang telah tidak meramu obat-obatan sesuai dengan arahan dokter.<sup>25</sup>

Upaya yang dilakukan untuk memahami hukum adalah dengan membuat penggolongan hukum namun hanya menggunakan ukuran-ukuran tertentu. Diantaranya:

1. Hukum berdasarkan wilayah pemberlakuannya yaitu hukum nasional dan hukum internasional.
2. Hukum berdasarkan bentuk kaidahnya
  - a. Hukum tertulis yaitu kaidah-kaidah hukum yang dinyatakan secara tegas dalam bentuk undang-undang tertulis dan ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, dll.
  - b. Hukum tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang dalam kenyataannya diterima, diakui dan mengikat masyarakat walaupun tidak dituangkan secara tertulis. Kaidah hukum ini biasanya tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan dalam

---

<sup>25</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, h. 152

masyarakat dan diterima oleh masyarakat sebagai hukum. Contohnya hukum adat di Indonesia.

### 3. Hukum berdasarkan sifat dan kekuatan sanksinya

- a. Kaidah hukum yang memaksa yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang dalam keadaan apa pun pada kenyataannya tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian individual yang dibuat oleh berbagai pihak. Kaidah hukum ini dalam keadaan apapun harus ditaati dan daya ikatnya bersifat mutlak. Contohnya, menurut pasal 80 UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan.
- b. Kaidah hukum yang mengatur adalah kaidah hukum yang dalam kenyataannya dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat ketentuan atau aturan khusus dalam perjanjian yang mereka adakan sendiri. Kaidah hukum ini baru akan berlaku apabila para pihak tidak menetapkan peraturan sendiri dalam perjanjian yang mereka adakan. Contohnya dalam perjanjian jual-beli, menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada saat penjual menyerahkan barang, saat itulah pembeli harusnya membayar biaya barangnya. Akan tetapi dalam praktiknya, kedua pihak dapat saja mengaturnya dengan cara yang berbeda sesuai kebutuhan seperti barang dapat diserahkan kepada pembeli walaupun bayarannya dilakukan secara berangsur.

### 4. Hukum berdasarkan isi kaidahnya

### 5. Hukum berdasarkan fungsi kaidahnya

Tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat setiap individu agar terwujud derajat kesehatan yang optimal seperti diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang

kesehatan. Tuntutan penerima layanan kesehatan terhadap pemberi kesehatan semakin tinggi dan sangat kompleks bahkan cenderung kritis. Hal itu tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, terutama berkenaan dengan pengobatan dan diagnosis yang banyak menggunakan alat-alat modern yang sebelumnya tidak dikenal. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat seiring dengan derasnya arus reformasi.<sup>26</sup>

Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu adalah suatu hal yang keliru apabila menganggap pasien selalu tidak dapat mengambil keputusan karena ia sedang sakit. Dalam pergaulan hidup normal sehari-hari, biasanya pengungkapan keinginan atau kehendak dianggap sebagai titik tolak untuk mengambil keputusan.

Dengan demikian walaupun seorang pasien sedang sakit, kedudukan hukumnya tetap sama seperti orang sehat. Jadi, secara hukum pasien juga berhak mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadapnya karena hal ini berhubungan erat dengan hak asasinya sebagai manusia. Kecuali jika dapat dibuktikan bahwa keadaan mentalnya tidak mendukung untuk mengambil keputusan yang diperlukan.

Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, persoalan mengenai kesehatan ini di negara kita diatur dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan: “kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonom”. Selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan “setiap orang mempunyai

---

<sup>26</sup> Suryani Soepardan dan Dadi Anwar Hadi, *Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan* (Cet. 1; Jakarta: EGC, 2007), h. 112.

hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”. Dalam hubungannya dengan hak asasi manusia, apa yang terjadi dan berkembang di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, menunjukkan suatu hal yang sangat menggembirakan. Di negara tersebut hak-hak pasien berkembang dengan baik, perkembangannya ini terutama karena adanya tekanan pada rumah sakit yang dilakukan oleh *Patient's Bill of right*, sehingga hak-hak pasien diakui oleh pengadilan. Hak tersebut antara lain, hak untuk menolak cara perawatan tertentu.<sup>27</sup>

Upaya meningkatkan profesionalisme berarti meningkatkan ilmu pengetahuan, mengikuti perkembangan, menguasai teknis profesi, dan menguasai berbagai hal yang erat kaitannya dengan masalah sosial kemasyarakatan karena dalam melaksanakan profesinya. Kegiatan pelayanan kesehatan merupakan suatu “transaksi” yang sering kali berhubungan dengan prestasi sedangkan di sisi lain menimbulkan adanya kontraprestasi atau imbalan. Kegiatan tersebut berlangsung terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya membentuk suatu peraturan.<sup>28</sup>

Hak terdiri atas 3 jenis yaitu hak kebebasan, hak kesejahteraan dan hak legislatif. Sedangkan menurut Badman menjelaskan syarat yang mempengaruhi penentuan hak-hak seseorang, yaitu:

1. Kebebasan untuk menggunakan hak yang dipilih oleh orang lain. Orang yang bersangkutan tidak dapat disalahkan atau dihukum karena menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut. Contoh, klien mempunyai hak untuk untuk pengobatan yang ditetapkan oleh dokter tetapi dia mempunyai hak untuk menerima atau menolak pengobatan tersebut.

---

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan*, h. 32 -33

<sup>28</sup> Suryani Soepardan dan Dadi Anwar Hadi, *Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan*, h. 113



2. Seseorang mempunyai tugas untuk memberikan kemudahan bagi orang lain untuk menggunakan hak-haknya. Contoh, tenaga kesehatan mempunyai tugas untuk meyakinkan dan melindungi hak-hak klien untuk mendapatkan pengobatan.
3. Hak harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yaitu persamaan, tidak memihak dan jujur. Contoh, semua klien mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
4. Hak untuk dapat dilaksanakan. Contoh, dibeberapa rumah sakit, para penentu kebijakan mempunyai tugas untuk memastikan bahwa pemberian hak-hak asasi manusia dilaksanakan untuk semua klien atau pasien.
5. Apabila hak seseorang bersifat membahayakan, maka hak tersebut dapat dikesampingkan atau ditolak dan orang yang bersangkutan akan diberi kompensasi atau pengganti. Contoh, apabila nama pasien tertunda dari jadwal pembedahan dengan tidak sengaja, pasien mendapat kompensasi untuk ditempatkan bagian teratas dari daftar pembedahan berikutnya.<sup>29</sup>

Dalam bidang kesehatan, misalnya hak memperoleh pemeliharaan kesehatan dan hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Pernyataan tersebut di atas sejalan dengan UU No. 36/ 2009 tentang kesehatan:

- 1) Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
- 2) Pasal 8 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

---

<sup>29</sup> Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, h. 33-34

Masyarakat mengupayakan kesehatan, upaya pemeliharaan dan pembanguna (pasal 9 ayat 1 UU No. 36/ 2009). Selain itu, setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologis maupun sosial dan berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya serta berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya (pasal 10, 11 dan 12 UU No. 36/ 2009).<sup>30</sup> Selain itu pasien dan dokter juga berhak menentukan apakah menerima ataupun menolak kesehatan yang diberikan seperti:

1. pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.<sup>31</sup>
2. Pasal 56 ayat 1 menyatakan “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”.<sup>32</sup>

Kemudian dengan berkembangnya otonomi daerah, masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten juga semakin marak untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan kesehatan, misalnya:

1. Peraturan Daerah (Perda)
2. Keputusan Gubernur, Wali kota atau Bupati

---

<sup>30</sup> Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 2011), h. 35

<sup>31</sup> UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, h. 4 [www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com) (1 November 2017)

<sup>32</sup> UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, h. 14 [www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com) (1 November 2017)

### 3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

### 4. Dan sebagainya.

Seperti yang telah disebutkan bahwa hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Oleh sebab itu, hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda, yakni:

- a. Penerimaan pelayanan, yang harus diatur hak dan kewajiban baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pelayanan, organisasi dan sarana-prasarana pelayanan yang juga harus diatur hak dan kewajibannya.<sup>33</sup>

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Di dalam sistem kesehatan nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas. Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan yang semula berupa upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang ke arah kesatuan upaya pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang cukup yaitu upaya peningkatan, upaya pencegahan, upaya penyembuhan dan upaya pemulihan.

Upaya kesehatan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan biologis yang bersifat dinamis. Pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang

---

<sup>33</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, h. 46.

bersifat menyeluruh, terpadu, merata dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>34</sup>

Mengingat bahwa upaya kesehatan harus dilaksanakan secara seimbang oleh pemerintah dan masyarakat. pemerintah diharapkan lebih mampu menghadapi tugasnya agar dapat mengatur secara baik masalah yang menyangkut dengan kesehatan. Dalam rangka pembangunan sektor kesehatan, peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya kesehatan perlu di sempurnakan dan lebih ditingkatkan. Dilihat dari aspek dikembangkannya sistem kesehatan nasional, perlu adanya pengkajian kembali dan melengkapi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, dengan mengeluarkan berbagai produk pokok hukum yang lebih sesuai yang dapat:

- 1) Mendukung adanya sarana pelayanan, program dan kegiatan dalam seluruh upaya kesehatan yang sudah atau yang akan dikembangkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat termasuk sektor swasta.
- 2) Memperhatikan kepentingan daerah dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan di sektor lain yang berkaitan dengan upaya kesehatan.
- 3) Berfungsi mendorong pengembangan upaya kesehatan yang diinginkan di masa mendatang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang dilayani.
- 4) Mengatur kewenangan tiap tingkatan upaya kesehatan.
- 5) Mengatur kewenangan dan tanggung jawab pembiayaan upaya kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 6) Mengatur wewenang dan tanggung jawab serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi jasa upaya kesehatan.

---

<sup>34</sup> Rahman Syamsuddin dan Amiruddin Pabbu, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*, h. 109

- 7) Mengatur kualitas upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.
- 8) Mengganti produk hukum yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi.
- 9) Memuat sanksi hukum yang sepadan, sehingga setiap pelanggar dapat ditindak sebagaimana mestinya.<sup>35</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih dari waktu ke waktu. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya bertambah besar dan kemungkinan melakukan kesalahan semakin besar pula, banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui kasus-kasus yang merugikan pasien.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Rahman Syamsuddin dan Amiruddin Pabbu, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*, h. 110

<sup>36</sup> Rahman Syamsuddin dan Amiruddin Pabbu, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan*, h. 111

## **BAB IV**

### **HUBUNGAN ANTARA HUKUM NASIONAL DENGAN HUKUM ISLAM TENTANG EUTHANASIA**

#### ***A. Pandangan hukum positif terhadap euthanasia***

Dalam uraian yang lalu telah penulis kemukakan, bahwa berdasarkan kode etik kedokteran Indonesia, seorang dokter berkewajiban mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Bagaimanapun gawatnya kondisi seorang pasien, setiap dokter harus melindungi dan mempertahankan hidup pasien tersebut, ini berarti betapapun gawatnya dan menderitanya seorang pasien, seorang dokter tetap tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang akan berakibat mengakhiri hidup atau mempercepat kematian pasien tersebut. Pemahaman ini dapat diambil dari kode etik keokteran indonesia pasal 7 d tentang kewajiban umum yang berbunyi: “setiap dokter harus senangtiasa akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani”.

Dari pemahaman atas pasal 7 d (dulu pasal 9) kode etik kedokteran indonesia tersebut dapat dikemukakan bahwa berdasarkan etik dan moral, tindakan euthunasia itu tidak diperbolehkan. Dalam hubungan ini mengemukakan: “menurut kode etik itu sendiri, maka di indonesia sebagai suatu negara yang beragama dan berpancasila kepada kekuasaan mutlak daripada tuhan yang maha esa, sedangkan dokter harus mengerahkan segala kepandaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup, tidak untuk mengakhirinya. Karenanya tidak menginginkan euthunasia dilakukan oleh seorang dokter karena antara lain dipandang bertentangan dengan etik kedokteran itu sendiri dan merupakan pelanggaran terhadap



perundang-undangan.<sup>1</sup> Dari keterangan tersebut di atas jelas lah bahwa euthunasia itu perbuatan yang melanggar hukum atau merupakan suatu tindak pidana. Karena perbuatannya itu mengakibatkan matinya orang lain, maka euthunasia itu termasuk tindak pidana pembunuhan. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan di bagi atas 2 yaitu:

#### 1. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Indonesia dirumuskan sebagai “pembunuhan (perbuatan) yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya”. Pengertian ialah bahwa dalam pembunuhan sengaja, kematiannya yang diakibatkan oleh perbuatan si pelaku betul-betul dikehendaki.

#### 2. Pembunuhan karena kesalahan

Apabila kematian tersebut tidak dikehendaki, maka perbuatan tersebut termasuk pembunuhan karena kesalahan atau kurang hati-hati, seperti yang diatur dalam pasal 359.<sup>2</sup> Pasal 359 berbunyi: “barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.<sup>3</sup> Mati disini tiak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa).<sup>4</sup> Misalnya terjadi kematian pada seorang pasien akibat tindakan dokter yang kurang

---

<sup>1</sup> Oemar Seno Adji, *Hengembanganukum Pidana P*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 78.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, h. 32.

<sup>3</sup> Tim Mahardika, *KUHP dan KUHP* (Cet. 1; Pustaka Mahardika, 2010), h. 107.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1994), h. 248.

hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi yang didalam rongga tubuh pasien.

Kitab Undang-undang Pidana mengatur seseorang dapat dipidana atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja ataupun karena kurang hati-hati. Ketentuan pelanggaran pidana yang berkaitan dengan euthanasia aktif terdapat pada pasal 334 KUHP.<sup>5</sup>

Dokter berperan penting mewujudkan euthanasia sebagai salah satu cara terwujudnya *Mercy Killing* dengan cara sebagai berikut.

- a. Ia membiarkan seorang pasien yang harusnya mendapatkan perawatan.
- b. Ia memberikan obat yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dosisnya
- c. Ia memberikan obat yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau bahkan tidak memberikan obat yang seharusnya diberikan.<sup>6</sup>

Apa yang telah dilakukan oleh seorang dokter dalam kaitannya berupa tindakan mengakhiri sebuah penderitaan seseorang, pasien yang takkan kunjung sembuh penyakitnya dapat dimintakan oleh pihak pasien sendiri atau keluarga pasien sendiri, akan tetapi disamping itu dapat saja dokter sendiri dalam melakukannya tanpa sepengetahuan dari pihak pasien atau keluarga pasien dengan pertimbangan keterpaksaan. Pada dasarnya hal ini ditempuh dikarenakan pihak pasien (korban) sudah merasa tidak kuat lagi atau tidak tahan lagi menahan penderitaan yang amat sangat. Misalnya karena penyakit akut, penyakit yang dinyatakan belum ada obatnya dan telah merasa putus asa atau pihak pasien sendiri atau keluarga pasien sudah merasa tidak lagi mampu membiayai perawatan yang cukup tinggi karena telah

---

<sup>5</sup> M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, “*Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Edisi 3*” (Jakarta: Egcc, 1999), h. 108

<sup>6</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, h. 152

kehabisan segala-galanya kemudian menyuruh atau membujuk atau meminta dengan *sangat seorang (dokter atau perawat) atau seseorang lain tersebut membantu atau mengabdikan kehendak si pasien tersebut sehingga melakukan pembunuhan jenis ini (euthanasia).*<sup>7</sup>

Sehubungan dengan masalah euthanasia di negara-negara yang telah maju seperti Inggris dan Belanda pernah dan telah di legalkan untuk dilakukan bahkan khususnya di Amerika Serikat diadakan hukum pass (*Possesion Assisted Suicide*) dimana seorang dokter memberikan pertolongan bunuh diri bagi para penderita HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) atau AIDS (*Acquired Immune Defiancy Syndrome*) dan termasuk juga negara-negara lainnya yang nyata sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia lainnya.

Namun, di Indonesia perbuatan untuk membantu walaupun atas permintaan yang bersangkutan, demikian juga termasuk orang yang menganjurkan untuk melakukan perbuatan bunuh diri jelas-jelas merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 334 dan pasal 345 KUHP.<sup>8</sup>

Menurut Leenen terdapat kasus-kasus yang disebut *pseudo-euthanasia* atau euthanasia semu yang tidak dapat dimasukkan pada larangan hukum pidana. Empat bentuk *pseudo-euthanasia* menurut Leenan yaitu:

- 1) Pengakhiran perawatan karena gejala mati batang otak. Jantung masih berdenyut, peredaran darah dan pernapasan masih berjalan tetapi tidak ada kesadaran karena otak seratus persen tidak berfungsi.

---

<sup>7</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, h. 153

<sup>8</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, h. 153

- 2) Pasien menolak perawatan atau bantuan medis terhadap dirinya. Dasar pemikirannya, dokter tidak dapat melakukan sesuatu jika tidak dikehendaki pasien.
- 3) Berakhirnya kehidupan akibat keadaan darurat karena kuasa tidak terlawan (*force majeure*). Dalam hal ini terjadi dua kepentingan hukum yang tidak bisa memenuhi kedua-duanya.
- 4) Penghentian perawatan/pengobatan/bantuan medis yang diketahui tidak ada gunanya.

Hukum Indonesia tidak mengenal dan tidak dapat membenarkan alasan atau motivasi euthanasia seperti yang dikemukakan Leenan tersebut. UU Indonesia tidak memberikan tempat untuk toleransi salah satu alasan pengakhiran hidup manusia dengan cara itu.<sup>9</sup> Dasar hukum untuk larangan euthanasia tercantum dalam pasal 334 KUHP. Pasal tersebut berbunyi: “barangsiapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.<sup>10</sup>

Dalam bab yang lalu telah penulis kemukakan bahwa euthanasia terbagi kepada euthanasia atas permintaan atau euthanasia sukarela dan euthanasia tidak atas permintaan. Euthanasia atas permintaan adalah tindakan euthanasia yang dilakukan atas dasar permintaan, persetujuan atau izin dari keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Sedangkan euthanasia tidak atas permintaan adalah euthanasia yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya permintaan atau persetujuan pasien atau keluarganya. Jika pembagian euthanasia ini dikaitkan dengan bunyi pasal 344 KUHP

---

<sup>9</sup> Ari Yunanto dan Helmi, *hukum pidana malpraktik medik*, h. 58

<sup>10</sup> M. Boediarti Et Al, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Cet. 2: Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 106

tersebut di atas, maka euthunasia sukarela atau euthunasia atas permintaan lah yang memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 344 KUHP tersebut. R. Soesilo dalam komentar atas pasal tersebut mengemukakan: “permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (ernstig), jika tidak maka orang-orang itu dikenakan pembunuhan biasa”.<sup>11</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa apabila seorang dokter memberikan suntikan yang mematikan kepada seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, maka ia dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan, dan ia diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, sesuai dengan pasal 344 KUHP.<sup>12</sup>

Di samping pembagian kepada euthunasia sukarela dan tidak sukarela, euthunasia juga terbagi kepada euthunasia aktif dan euthunasia pasif. Euthunasia aktif adalah suatu peristiwa di mana seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya, secara sengaja melakukan tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup si pasien. Sedangkan euthunasia pasif adalah suatu keadaan dimana seorang dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien, yang dapat memperpanjang hidupnya.

Euthunasia aktif merupakan jenis euthunasia yang dilarang dan euthunasia semacam inilah yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun yang tercantum dalam pasal 344 KUHP tersebut di atas. Sedangkan euthunasia pasif yang berupa penghentian atau tidak memberikan pengobatan kepada pasien yang disuga keras tidak mungkin disembuhkan lagi, apa lagi atas dasar permintaan dari keluarga

---

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1976), h. 209

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, “*Positif Dan Hukum Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Islam*”, h. 65

pasien, tidak dianggap sebagai tindak pidana dan dengan sendirinya tidak dikenakan hukuman.

Walaupun euthunasia itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, sebagaimana diatur dalam pasal 344 KUHP, namun kenyataannya di Indonesia, sejak terbentuknya kitab undang-undang hukum pidana sampai sekarang belum ada kasus nyata dan di putus oleh pengadilan. Namun demikian dengan tercantumnya pasal 334 KUHP tersebut, pembuat undang-undang tentunya sudah menduga bahwa euthunasia akan terjadi di Indonesia, sehingga dianggap perlu untuk mengaturnya dalam undang-undang.

Terhambatnya kasus euthunasia, sehingga tidak dapat sampai ke pengadilan di sebabkan oleh beberapa hal:

1. Mungkin euthunasia ini memang betul-betul terjadi di Indonesia, akan tetapi kasusnya tidak pernah dilaporkan kepada polisi, sehingga sulit untuk diadakan pengusutan lebih lanjut.
2. Mungkin juga karena keluarga si korban tidak tahu bahwa telah terjadi kematian yang disebut sebagai euthunasia, atau mungkin karena masyarakat Indonesia ini kebanyakan masih awam terhadap hukum, apalagi yang menyangkut masalah euthunasia, yang jarang terjadi bahkan tidak pernah terjadi.
3. Alat-alat kedokteran di rumah-rumah sakit di Indonesia belum semodern seperti di negara-negara maju, misalnya adanya respirator, sistem organ transplantasi dan sebagainya yang dapat mencegah kematian seorangpasien secara teknis untuk beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, *Euthunasia "Dan Hukum Pidana Hak Asasi Manusia"* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 134



Menurut Imron halimy di samping tiga sebab tersebut di atas, perumusan pasal 334 KUHP sendiri, juga terjadi penyebab kesulitan untuk mengadakan penuntutan atas kasus euthunasia di pengadilan. Hal ini karena unsur “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Yang terdapat dalam pasal 334 KHUP tersebut, sulit untuk di buktikan. Sebabnya ialah karena orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati tersebut telah meninggal dunia.

Di samping itu, kesulitan lain untuk membuktikan adanya permintaan sendiri tersebut ialah bahwa seorang pasien kadang-kadang berada dalam keadaan koma yang berkepanjangan, hidup tidak, matipun tidak. Dalam kondisi semacam ini ia (pasien) tidak bisa berbicara, berbuat atau bergerak apalagi menyatakan permintaan untuk mati, yang dalam pasal 344 tersebut harus dinyatakan sendiri oleh pasien. Selain daripada itu, apabila permintaan tersebut dikeluarkan oleh keluarga si pasien, maka pasal 334 KUHP ini tetap tidak bisa di terapkan. Hal ini oleh karena pasal ini menghendaki permintaan tersebut harus dilakukan oleh pasien itu sendiri.<sup>14</sup>

Ketentuan ini harus diingat kalangan kedokteran sebab walaupun terdapat beberapa alasan kuat untuk membantu pasien/keluarga pasien mengakhiri hidup atau memperpendek hidup pasien, ancaman hukuman ini harus dihadapinya.<sup>15</sup>

Untuk jenis euthunasia aktif maupun pasif tanpa permintaan, beberapa pasal di bawah ini perlu diketahui oleh dokter, yaitu:

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, “*Positif Dan Hukum Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Islam*”, h. 68

<sup>15</sup> M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, “*Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Edisi 3*” (Jakarta: Egco, 1999), h. 108

- 1) Pasal 338 KUHP: “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pasal 340 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.
- 3) Pasal 359 KUHP: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.<sup>16</sup>

Masalah euthanasia merupakan masalah rumit yang harus dihadapi karena menyangkut aspek medis, moral, agama, sosial-budaya, dan lain sebagainya. Jika digunakan pasal-pasal diatas, maka petugas kesehatan sangat rawan posisi hukumnya. Tidak mudah menentukan sikap dalam masalah ini karena masih diperlukan penelitian dari ahli hukum, kedokteran dan tokoh-tokoh masyarakat terhadap euthanasia tersebut. Dilema yang hadapi kalangan kesehatan dalam masalah ini, sama rumitnya dengan masalah aborsi. Faktor perubahan pandangan kesehatan, hukum dan masyarakat selalu berpengaruh dari upaya pemecahan masalah tersebut. Sementara ini setiap hari dalam pelayanan kesehatan masyarakat terutama yang dirawat di rumah sakit kasus-kasus euthanasia selalu dihadapi petugas kesehatan, namun pedoman untuk memilih sikap ini belum ditentukan. Akhirnya dapat dikemukakan bahwa dalam menghadapi masalah euthanasia yang rumit, karena tidak ada pilihan pengobatan yang lebih baik, mutlak diperlukan diskusi dengan para kolega dokter dan

---

<sup>16</sup> Pustaka Buana, *Kuhp Dan Kuhap* (Cet. Ii, Buana Press, 2014), h. 114

tim kesehatan lain, keluarga, maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga dapat menemukan solusi yang tepat.<sup>17</sup>

Dapat dilihat dari tiap jenis euthanasia ada aspek moral dan etika yang harus menjadi pertimbangan mendalam mengingat penentuan hidup dan mati tidak di tangan manusia semata. Apabila melihat lebih jauh mengenai hak-hak pasien untuk menentukan nasib sendiri, euthanasia tampak sebagai pilihan cerdas untuk mengakhiri penderitaan karena toh pasien tidak keberatan hidupnya berakhir jika dilihat dari jenis euthanasia sukarela. Namun penghargaan atas nilai insani tidak begitu saja dapat diabaikan meskipun oleh si pemilik jiwa itu sendiri yaitu pasien. Karena bagaimanapun akan membuka peluang bagi yang lain untuk begitu mudah mengakhiri hidup yang tidak lagi mampu menahan penderitaan. Hal ini bertentangan dengan fitrah manusia untuk berjuang dan bertahan hidup meskipun harus menghadapi tantangan dan penderitaan.<sup>18</sup>

Menurut H. Blijham seorang psikiater, keberatan terhadap euthanasia karena dianggap suatu keputusan yang terlalu sepihak dan terlalu teknis mengadakan pendekatan terhadap penelenggaraan bantuan pelayanan pengakhiran kehidupan.<sup>19</sup> Masalah euthanasia sudah menjadi perdebatan oleh para ahli sejak lama, namun masalah ini akan terus menjadi bahan diskusi, utamanya jika kasus-kasus menarik. Contohnya ketika di Indonesia ada seorang suami yang meminta fatwa pengadilan agar dikabulkannyapermohonan euthanasia untuk istrinya karena istrinya dalam keadaan tidak sadar (koma) selama berbulan-bulan. Ahli hukum dan ahli kesehatan

---

<sup>17</sup> Ta'adi, *Hukum Kesehatan*, h. 57-58

<sup>18</sup> Alexandra Ide, *Etika Hukum dan Pelayanan Kesehatan* (Cet. 1; Yogyakarta: Grasia Book Publisher, 2012), h. 66-67

<sup>19</sup> Alexandra Ide, *Etika Hukum dan Pelayanan Kesehatan*, h. 67

serta ahli agama berupaya mendiskusikannya untuk mencari solusi. Akan tetapi pada akhirnya pengadilan menolak permohonan tersebut. Kompleks permasalahan karena sudut pandang yang berbeda yang membuat mereka tidak menemukan titik temu, meskipun pokok permasalahan cukup sederhana yaitu hak pasien untuk menghentikan penderitanya. Para ahli yang merupakan representasi dari ahli agama, hukum medik dan sosiolog belum berhasil memperoleh kesepakatan sehingga kondisi seperti ini akan menempatkan jajaran pemberi pelayanan kesehatan pada posisi yang dilematis pada saat menghadapi realita yang sesungguhnya.<sup>20</sup>

Aspek kehidupan seorang manusia tidak bisa hanya dinilai secara individual karena baik hidup maupun kematian seseorang selalu berhubungan dengan orang lain. Kesedihan yang mendalam, rasa kehilangan sampai dengan aspek yang berhubungan dengan hubungan sosial lainnya tidak begitu mudah bisa dipandang sebelah mata. Apalagi jika pasien sudah dalam kondisi koma yang bertahun-tahun lamanya. Faktor biaya, perawatan dan faktor mental-spiritual menjadi harga yang begitu mahal harus dibayar untuk mempertahankan hidup seseorang tanpa tau apakah harapan itu masih ada. Meskipun menyakitkan bagi orang terdekat pasien, rasa sedih dan kehilangan namun itu tidak akan sebanding dengan pasien yang sudah tidak ada harapannya lagi.<sup>21</sup>

Membiarkan mereka bekerja dalam situasi dilema yang secara hukum tidak pasti akan menimbulkan keraguan dalam mengambil keputusan, sehingga dapat terjadi keputusan yang berbeda untuk menangani masalah yang sama. Kadangkala petugas akan di hadapkan pada dilema seperti meneruskan bantuan pengobatan

---

<sup>20</sup> Ta'adi, *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional* (Cet. 1; Jakarta: EGC, 2009), h. 51

<sup>21</sup> Alexandra Ide, *Etika Hukum dan Pelayanan Kesehatan*, h. 67-68

sesuai sumpah yang diikrarkannya atau menghentikan pengobatan yang berefek pada kematian. Parameter “akal sehat”, sering menjadi pembenaran tindakan yang diambil oleh petugas kesehatan. Pasien dalam keadaan “brain death” yang dirawat di kamar ICU, secara akal sehat dengan peralatan canggih kedokteran masa kini dapat ditopang kehidupannya, sehingga jantung dan paru pasien masih berfungsi. Tetapi akal sehat juga harus berfikir bahwa biaya yang sangat besar harus dikeluarkan oleh pasien, sedangkan hasilnya “*unpredictable*” sehingga tidak melanjutkan pengobatan. Di lain pihak ketika ada pasien dalam keadaan gawat, walaupun petugas masih mampu menanggulangi tetapi keluarganya atau pasien sendiri yang menolak tindakan untuk diobati.<sup>22</sup>

Apapun alasan untuk euthanasia pasti memerlukan jawaban yang tidak mudah, apalagi bagi orang yang memiliki agama tertentu dan meyakini keajaiban Tuhan. Namun secara manusiawi, setiap orang pasti dihadapkan pada pilihan yang dianggap terbaik bagi semua pihak meskipun tidak selalu memuaskan. Hal ini juga yang dilandasi hukum Nasional untuk melarang euthanasia.

Euthanasia yang dimungkinkan adalah euthanasia pasif dimana segala alat penunjang kehidupannya dilepaskan dengan syarat telah disetujui oleh semua anggota keluarga pasien. Hal ini memang tampak rumit dan bertele-tele, tetapi dapat dipandang sebagai cara untuk menghormati hidup makhluk insani dan tidak dengan mudah diakhiri nyawanya. Namun harus pula ditemukan kearifan dalam bersikap dan dipikirkan jalan terbaik untuk menekan biaya perawatan dan rumah sakit bagi mereka yang tanpa harapan hidup tetapi harus mempertahankan hidupnya atau setidaknya

---

<sup>22</sup> Ta’adi, *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional* (Cet. 1; Jakarta: EGC, 2009), h. 51-52

jalan keluar agar orang-orang yang ada di sekitar pasien tetap bisa hidup dan bertahan.<sup>23</sup>

Banyak orang berpendapat kalau Indonesia mengakui bunuh diri itu hak untuk mati, maka perlu pula diatur untuk hal-hal tertentu bagi pasien yang tidak mampu untuk melakukan bunuh diri tetapi penderitaannya tidak tertahankan, untuk mendapatkan pertolongan mengakhiri hidupnya dengan tidak membebani pihak lain dengan perasaan bersalah atau tidak nyaman. Perlu kiranya direnungkan/dipikirkan, selain hak seseorang untuk mendapatkan hidup sehat, ada hak seseorang, apabila kualitas hidup sudah sedemikian buruknya, untuk mati dengan baik tanpa perlu membebani pihak manapun juga tentunya untuk kasus-kasus tertentu seperti euthanasia.<sup>24</sup>

## **B. Hukum Euthanasia Menurut Syariat Islam**

Euthanasia adalah istilah yang didapati dalam dunia kedokteran diartikan sebagai pembunuhan tanpa penderitaan terhadap pasien yang sedang kritis (akut) atau menderita penyakit menahun serta tipis harapannya untuk sembuh kembali. Seorang pasien yang sedang sakit parah dan tidak sanggup lagi lalu bermohon agar dokter mengakhiri hayatnya maka dikabulkanlah permintaan itu atas pertimbangan pasien tersebut tipis harapannya untuk sembuh.<sup>25</sup>

Para tokoh Islam Indonesia sangat menentang dilakukannya euthanasia namun ada beberapa ulama yang mendukungnya, menurutnya euthanasia boleh dilakukan apalagi terhadap penderita penyakit menular apalagi kalau tidak bisa disembuhkan.

---

<sup>23</sup> Alexandra Ide, *Etika Hukum dan Pelayanan Kesehatan*, h. 68

<sup>24</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran* (Cet. 1; Mandar Maju, 2001), h. 109

<sup>25</sup> Arifin Rada, *Jurnal Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei), h. 112-113



Pendapat Ibrahim Hosen ini disandarkan kepada suatu kaidah *ushul fiqh*: *Al-Irtifaqu Akhaffu Dlarurain*, melakukan yang teringan dari dua *mudllarat*. Jadi katanya, langkah ini boleh dipilih karena ia merupakan pilihan dari dua hal yang buruk. *Pertama*, penderita mengalami penderitaan. *Kedua*, jika menular membahayakan sekali artinya dia menjadi penyebab orang lain menderita karena tertular penyakitnya dan beliau bukan hanya menganjurkan euthanasia pasif tapi juga euthanasia aktif. Sedangkan menurut Hasan Basri pelaksanaan euthanasia bertentangan, baik dari sudut pandang agama, undang-undang maupun etik kedokteran. Namun, para ulama sepakat bahwa apapun alasannya apabila tindakan itu berupa euthanasia aktif yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, Islam mengharamkannya sedangkan terhadap euthanasia pasif, para ahli baik dari kalangan kedokteran, ahli hukum pidana, maupun ulama sepakat membolehkannya.<sup>26</sup>

Dr. Yusuf al-Qardawi menerangkan bahwa euthanasia aktif adalah haram karena dalam kaedah ini pengamal perbuatan bertindak mengakhiri hayat pesakit dan menyebabkan kematiannya dengan cara suntikan bahan tertentu, kejutan elektrik, senjata tajam dan sebagainya. Ini adalah sama halnya dengan membunuh dan membunuh adalah dosa besar di dalam Islam. Sebaliknya beliau berpendapat bahwa penghentian perawatan kepada pasien adalah dibenarkan di dalam Islam dengan syarat setelah pakar-pakar perubatan sepakat bahwa pasien tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh.

---

<sup>26</sup> Arifin Rada, *Jurnal Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei), h. 113

Salah satu tujuan disyariatkannya agama Islam adalah untuk memelihara jiwa manusia. Dalam rangka memelihara jiwa ini, manusia diperintahkan melakukan upaya-upaya guna mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diperintahkan untuk makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal. Apabila ia sakit maka ia diperintahkan untuk berobat. Disyariatkannya hukuman qishash dan diat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan juga dalam rangka menegakkan kehidupan ini, sebaliknya perbuatan-perbuatan yang akan merusak kehidupan manusia, seperti pembunuhan dilarang untuk dilakukan dan diwajibkan bagi manusia untuk menolaknya.<sup>27</sup> Menurut Imam Syafi'i pembunuhan sengaja adalah membunuh seseorang dengan sesuatu yang bisa menyebabkan kematian dan dengan adanya niat untuk membunuh. Dalam kasus ini pembunuh dikenai qishas tetapi jika keluarga korban memaafkan maka pembunuh harus membayar diyat besar dan dibayar langsung dari harta pembunuh. Pembunuhan tidak disengaja adalah melempar sesuatu dan mengenai orang yang menyebabkan meninggal karena lemparan tersebut dan tidak ada unsur sengaja. Sedangkan pembunuhan sengaja tetapi ada unsur kesalahan adalah melempar sesuatu dengan benda yang biasanya menyebabkan kematian dan membuat seseorang meninggal, dalam kasus ini tidak ada qisash bagi pembunuh tapi harus membayar diyat kecil kepada keluarga korban dan dapat diangsur selama 3 tahun.<sup>28</sup>

Manusia diamanahkan supaya menjaga tubuh badan dengan baik mengikut landasan yang telah ditetapkan. Islam tidak membenarkan bunuh diri karena manusia bukan pencipta kepada diri mereka sendiridan bukan pemilik mutlak. Dalam Islam

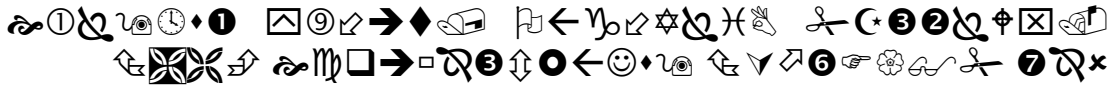
---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*". h.69

<sup>28</sup> Eko Setiawan, *Eksistensi Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Al-Ahwal, 1 April 2015), h. 166

masalah kematian manusia merupakan hak Allah swt. Oleh karena itu, perbuatan yang mengarah kepada kematian dengan cara apapun baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Termasuk perihal euthanasia aktif karena tindakan pembunuhan secara euthanasia ini merupakan pembunuhan tanpa hak. Allah swt adalah pemilik dan pemberi kehidupan kepada manusia, maka dialah yang berhak memberi atau mengambil nyawa manusia. Dalam ajaran Islam, seseorang yang menanggung penderitaan diminta untuk bersabar dan ridho karena beliau akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah swt. Panduan kode etik perubahan Islam telah dinyatakan bahwa pengamal perubatan tidak mempunyai kuasa untuk menamatkan nyawa seseorang pasien walaupun pasien tersebut telah dibuktikan tidak dapat dipulihkan secara saintifik. Sebaliknya pengamal perobatan hendaklah mencoba segala upaya untuk mengekalkan nyawa pasien tersebut karena tanggung jawab pengamal perobatan adalah untuk membantu dalam penyambungan nyawa bukannya kematian. Menurut first internasional conference of islamic medicine anjuran islamic organisation of medical science pada tahun 1981 di kuwait telah menyatakan bahwa tidak ada sebarang alasan yang kukuh untuk menghilangkan penderitaan dan kesiksaan pasien.<sup>29</sup> Firman Allah SWT Al-Ma'idah ayat 32:

<sup>29</sup> Farahwahida mohd yusof, jurnal teknologi (15 agustus 2013), h. 39. [www.jurnalteknologi.utm.my](http://www.jurnalteknologi.utm.my) (rabu, 25 oktober 2017).



Terjemahnya:

“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.<sup>30</sup>

Setelah menguraikan kisah pembunuhan secara aniaya yang pertama serta dampak-dampaknya yang sangat buruk dan setelah terbukti melalui kisah ini betapa tergesa-gesa manusia, ayat ini menegaskan bahwa: *oleh karena itu*, yakni oleh karena kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk itu dan oleh karena perilaku Bani Israil yang telah dipaparkan sekian kali, maka *Kami Yang Maha Agung menetapkan* suatu hukum yang menyangkut satu persoalan yang besar dan hukum itu Kami sampaikan *atas Bani 'Israil bahwa: barang siapa yang membunuh stu jiwa* salah seorang putra putri Adam, bukan karena orang itu membunuh *jiwa* orang yang *lain* yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh, *atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi*, yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, *maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia*, misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarganya, atau menyelamatkan nyawa seseorang dari satu bencana, atau membela seseorang yang dapat terbunuh secara aniaya, *maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka para rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas*, yang membuktikan kebenaran

---

<sup>30</sup>Lajnah Pentashihah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 113

para rasul itu dan kebenaran petunjuk-petunjuk itu. Tetapi, kendati demikian, *kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh telah membudaya pada dirinya sikap dan perilaku melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.*<sup>31</sup>

Kata ( ) *ajl* dalam kalimat ( ) *min ajl/oleh karena itu* pada mulanya berarti kejahatan yang dikhawatirkan terjadi di masa datang. Kata ini kemudian berkembang maknanya sehingga menjadi *oleh karena* atau *disebabkan*, baik karena adanya kejahatan maupun tidak. Pada ayat ini, tidak tertutup kemungkinan untuk memahami kata itu sesuai dengan makna asalnya. Yakni, disebabkan oleh kejahatan pembunuhan yang dikhawatirkan terjadi di masa datang, Allah menetapkan apa yang disebut dalam ayat ini.

Ketetapan tersebut sebagaimana redaksi kata ini adalah *atas Bani 'Isra'il*. Penggunaan kata ( ) *'ala/atas* mengandung makna kewajiban dan, dengan demikian, ayat ini menginformasikan bahwa ketetapan hukum tersebut disampaikan kepada Bani Isra'il atas dasar satu kewajiban bagi mereka.

Penyebutan Bani Isra'il secara khusus dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa kaum tersebut telah mencapai puncak keburukan dalam pembunuhan karena yang mereka bunuh adalah manusia-manusia suci yang diutus Allah sebagai nabi dan rasul-rasul.

Ayat di atas mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dan membunuh semua manusia, dan yang menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan semua manusia. Penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan, dan keserasian al-qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 99-100



Peraturan baik apa pun yang ditetapkan oleh manusia atau oleh Allah, pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat manusia. Dan, kalau kita menyebut kata “masyarakat” maka kita semua tahu bahwa ia adalah kumpulan dari saya, anda dan dia, kumpulan dari manusia.<sup>32</sup>

Adalah sangat mustahil memisahkan seorang manusia selaku pribadi dan masyarakatnya. Pemisahan ini hanya terjadi pada daratan alam teori, tetapi dalam kenyataan sosiologis, bahkan dalam kenyataan psikologis, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya, walau ketika ia hidup di dalam gua sendirian. Bukankah manusia yang berada sendirian di gua menemukan makhluk lain bersamanya, saat itu pula seorang atau ribuan anggota masyarakatnya mempunyai kedudukan yang sama bahwa semua harus dihargai. Sehingga, barang siapa yang membunuh manusia seluruhnya. Demikian juga sebaliknya.

Thabathaba'i menguraikan persamaan itu antara lain dengan menyatakan bahwa setiap manusia menyandang dalam dirinya nilai kemanusiaan, yang merupakan nilai yang disandang oleh seluruh manusia. Seorang manusia bersama manusia lain adalah perantara lahirnya manusia-manusia lain bahkan seluruh manusia. Manusia diharapkan hidup untuk waktu yang ditetapkan Allah, antara lain untuk melanjutkan kehidupan jenis manusia seluruhnya. Membunuh seseorang yang berfungsi seperti yang dijelaskan di atas adalah bagaikan membunuh semua manusia, yng keberadaannya ditetapkan Allah demi kelangsungan hidup jenis manusia. Agaknya, karena itu pula Habil menyatakan tidak akan membunuhnya karena takut kepada Allah.

---

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan, dan keserasian al-qur'an*, h. 101



Thahir Ibn ‘Asyur menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan, bukannya menilai pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan pembunuhan terhadap semua manusia, tetapi ia bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya pada hakikatnya menenangkan dorongan nafsu amarah dan keinginannya membalas dendam atas dorongan kewajiban memelihara hak asasi manusia serta kewajiban mengekang dorongan nafsu. Nah, siapa yang menuruti kehendak nafsu seperti itu, tidak ada jaminan untuk tidak melakukan hal serupa pada kesempatan yang lain dan berulang-ulang, walau dengan membunuh semua manusia.

Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa, dalam pandangan al-qur’an, semua manusia, apa pun ras, keturunan dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim keistimewaan satu ras atas ras yang lain, baik dengan memperataskan agama sebagai anak-anak dan kekasih Tuhan seperti orang-orang Yahudi maupun atas nama ilmu dan *kenyataan* seperti pandangan kelompok rasialis Nazi dan semacamnya.

Kata *kemudian* pada firman-Nya: *kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas* berfungsi mengisyaratkan *tingkatan jauh*, bukan dalam arti *setelah waktu itu*, karena ini ditegaskan oleh kalimat *sesudah itu*. Tingkatan jauh yang dimaksud adalah tingkatan pelampauan batas oleh mereka. Bukankah kedatangan rasul-rasul pada suatu kaum dengan membawa aneka bukti dan penjelasan yang silih berganti merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, lalu sikap Bani Isra’il yang terus-menerus membangkang setelah kedatangan bukti-bukti itu lebih luar biasa lagi? Inilah yang ingin dilukiskan oleh kata *kemudian* itu. Dengan demikian, ayat ini menggunakan sekian banyak penekanan; pertama, kata

*kemudian*; kedua, kata ( ) *inna/sesungguhnya*; ketiga, kata *sungguh-sungguh*; dan keempat, kata *musyrifun* yang maknanya seperti dikemukakan di atas.<sup>33</sup>

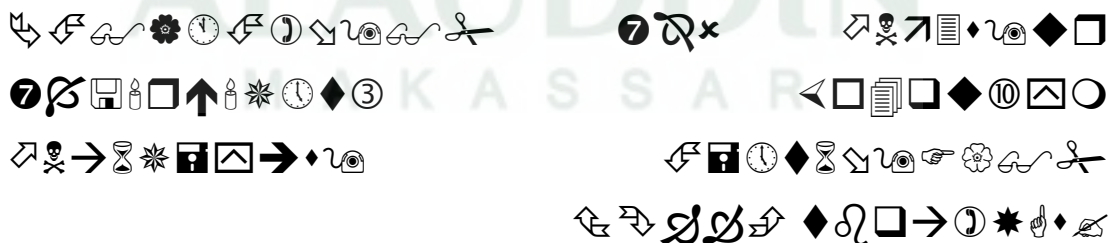
Begitu pula pendapat dari para tokoh Islam di Indonesia seperti Amir Syarifuddin menyatakan bahwa euthanasia adalah pembunuhan seseorang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan si sakit. Euthanasia yang sering terjadi pada umumnya dalam dunia kedokteran misalnya tindakan dokter dengan memberi obat atau suntikan. Rumusan ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh komisi dari fatwa MUI bahwa euthanasia adalah pembunuhan dengan didampingi oleh pertimbangan medis bagi seseorang penderita atau mengidap penyakit yang mana tidak mungkin lagi disembuhkan. Dalam menelaah berbagai konsep euthanasia yang telah dirumuskan oleh para ahli, baik dari kalangan atau pakar Islam, dasar perumusannya dapat ditemukan di dalam Al-qur'an maupun hadis Nabi. Jadi Islam pulalah yang memahami bahwa euthanasia adalah suatu keinginan dalam usaha mempercepat kematian akibat ketidak mampuan menahan penderitaan. Jadi euthanasia merupakan suatu usaha untuk membantu seseorang yang sedang mengalami sakit atau penderitaan yang tidak mungkin disembuhkan untuk dapat mempercepat kematian dengan alasan membantu menghilangkan penderitaan yang kian dirasakan, padahal sama sekali tidak dapat mengakhiri penderitaannya. Jadi hukum Islam dapat menanggapi euthanasia secara umum ini memberikan suatu konsep bahwa untuk menghindari terjadinya euthanasia, utamanya euthanasia aktif. Umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk penderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah swt. Hal ini hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakkal,

---

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan, dan keserasian al-qur'an*, h. 102

dan diharapkan pula kepada dokter untuk berpegang kepada kode etik dan sumpah jabatannya. Beberapa ulama memberikan konsep tentang euthanasia secara khusus bagi penderita yang penyakitnya menular. Contohnya penderita AIDS, menurut AF. Ghazali dan salah seorang ketua MUI pusat HS. Pradjokusumo mengatakan bahwa mengisolasi penderita AIDS dipandang penyelesaian terbaik ketimbang harus dihilangkan nyawanya (di euthanasia). Hal ini berarti bahwa kalau sedapat mungkin euthanasia dapat dihindari, mengapa tidak dilakukan karena ada pepatah mengatakan dimana ada kemauan disitu pasti ada jalan. Kalau dokter sudah menyerah untuk mengobati pasiennya lebih baik dikembalikan kepada keluarganya tanpa maksud untuk menghentikan bantuan kepada si pasien.<sup>34</sup>

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. nyawa seseorang adalah mahal karena itu harus dijaga dan dilindungi. Tentang ketentuan hukum *qisas* mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul kejaaran, lantaran harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukannya.<sup>35</sup> Dalam kitab suci al-qur'an terdapat banyak ayat yang melarang pembunuhan bahkan mengancamnya dengan hukuman diantaranya dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 179:



<sup>34</sup> Arifin Rada, *Jurnal Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei), h. 114-115

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 127.

Terjemahnya:

“dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Sisi lain yang dapat dipetik dari sanksi pidana pembunuhan bahwa pihak keluarga korban diberikan hak otonomi sepenuhnya untuk memilih hukuman yang bakal dikenakan terhadap pelakunya. Hal ini mempunyai relevansi kuat dengan pertimbangan psikologi keluarga, betapa menderitanya pihak keluarga lantaran salah satu anggotanya meninggal, lebih-lebih karena dibunuh oleh seseorang. Pihak keluarga korban sedikit banyak mengetahui kepribadian anggota keluarganya. Apabila mereka mengetahui bahwa yang terbunuh adalah salah seorang anggota keluarga yang akhlaknya kurang baik dan/atau tidak terpuji, mereka dapat memakluminya jika ia dibunuh oleh seseorang. Oleh karena itu, ia tidak akan dendam kepada pembunuhnya bahkan kemungkinan besar akan memaafkan pelaku dari pembunuhan dimaksud.<sup>36</sup>

Selain melarang dilakukannya pembunuhan terhadap orang lain, syariat Islam juga melarang dilakukannya perbuatan bunuh diri. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, dapat diambil suatu asumsi bahwa euthunasia, terutama euthunasia aktif, di mana seorang dokter melakukan upaya aktif membantu mempercepat kematian seorang pasien, yang menurut dugaan dan perkiraannya tidak dapat bertahan untuk hidup meskipun atas permintaan dan persetujuan si pasien atau keluarganya, jelas dilarang oleh Islam, karena perbuatan tersebut tergolong kepada pembunuhan dengan sengaja. Berdasarkan Al-qur'an, pembunuhan yang dibolehkan oleh Islam, hanya pembunuhan yang dilakukan karena alasan yang sah menurut syara, sedangkan

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, h. 128

euthunasia tidak termasuk dalam jenis (alasan) ini. Pembunuhan yang dibolehkan menurut ayat tersebut, seperti dijelaskan oleh sayid sabiq, yang rinciannya meliputi:

1. Pembunuhan sebagai hukuman terhadap pezina muhshah (yang sudah berkeluarga).
2. Hukum bunuh bagi pelaku pembunuhan sengaja.
3. Hukum bunuh bagi orang yang murtad dan mengganggu keamanan.<sup>37</sup>

Di samping itu, permintaan untuk dilakukannya euthunasia baik oleh pasien maupun keluarganya, mencerminkan sikap dan perasaan putus asa. Sikap semacam ini tentu saja tidak disukai dan dilarang oleh Allah Swt. Sebagaimana dalam QS.

Yusuf (12) ayat 87:



Terjemahnya:

“hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”.

AR. Fachruddin yang di kutip oleh Imron Halimy mengemukakan bahwa dilihat dari aspek agama Islam, euthunasia untuk “menolong” si penderita adalah ditolak dengan tegas, sebab orang yang sudah koma tidak dapat merasakan apa-apa lagi. Mungkin malah justru orang yang masih hiduplah, yang merasa menderita.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, “Islam Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum”. h.75.

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, “Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam”. h. 76.



Perintah untuk selalu berfikir positif ketika di beri penyakit oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam QS. As-syuraa' ayat 80:



Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku”.<sup>39</sup>

Asbabun Nuzulnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim no. 4069 yang artinya Aisyah r.a meriwayatkan bahwa biasanya bila ada seseorang yang mengeluh sakit atau terkena luka Rasulullah saw. berdoa sambil jari tangannya seperti ini, lalu sufyun meletakkan jari telunjuknya ke tanah dan mengangkatnya kembali (mencontohkan perbuatan Nabi). “dengan nama Allah, debu tanah kami dan dengan ludah sebagian kami semoga orang yang sakit di antara kami dapat sembuh dengan seizin Tuhan kami”.

Alasan lain yang masih berkaitan dengan pelarangan euthanasia aktif ini ialah adanya larangan untuk meminta mati, walaupun menurut sayid sabiq larangan tersebut termasuk tingkat makruh.

Larangan tersebut tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah yang pada intinya mengungkapkan bahwa larangan mengharapkan kematian karena penyakit ataupun bahaya yang menimpah dan apabila keinginan yang sangat kuat untuk mati maka ucapkan Ya Allah, hiduskanlah aku selama hidup itu baik bagiku dan matikanlah aku apabila mati lebih baik bagiku.

segainya, semuanya adalah komponen jasmani (jasad), sedangkan unsur yang kedua yaitu ruh memang tidak dikenal oleh pengetahuan biomedis. Hal ini disebabkan karena ruh termasuk benda gaib yang tidak dapat terdeteksi oleh

<sup>39</sup> Lajnah Pentashihah, *Al-Quran & Terjemah*, h. 370



pengetahuan manusia kecuali hanya sedikit sekali. Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kematian itu terjadi bukan hanya karena berhentinya fungsi spontan pernapasan dan jantung, sebagaimana dikemukakan oleh PB IDI, melainkan juga karena terlepasnya ruh dari jasad manusia. Apabila ruh masih ada dalam diri manusia, maka manusia itu dikatakan hidup, dan apabila ruh itu sudah pergi (terlepas), maka ia dikatakan mati.<sup>40</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an ditegaskan bahwa masalah pemberian ruh, yang menyebabkan manusia hidup, dan pencabutannya yang menyebabkan manusia mati, sepenuhnya merupakan wewenang Allah Swt. bukan wewenang manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Yunus (10) ayat 56:

→ ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَيْدُكَ وَلَٰكِنَّكَ أَنتَ الْمَكِيدُ ۚ﴾ ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَيْدُكَ وَلَٰكِنَّكَ أَنتَ الْمَكِيدُ ۚ﴾ ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَيْدُكَ وَلَٰكِنَّكَ أَنتَ الْمَكِيدُ ۚ﴾ ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَيْدُكَ وَلَٰكِنَّكَ أَنتَ الْمَكِيدُ ۚ﴾

Terjemahnya:

“Dia-lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Dari ayat tersebut di atas jelaslah bahwa menurut pandangan Islam, manusia tidak mempunyai hak untuk menentukan sendiri saat kematiannya, sebagaimana yang diakui oleh kalangan kedokteran. Oleh karenanya maka persetujuan yang diberikan oleh seorang pasien kepada dokter untuk membantu mempercepat kematiannya, dianggap tidak ada dan tidak berpengaruh sama sekali terhadap larangan perbuatan pembunuhan. Dengan demikian, dokter yang melakukan euthunasia tetap dianggap melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi hukuman.

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, “Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam”. h. 78-79.

Di samping itu, mati berkaitan dengan ajal, dan ajal hanya Allah lah yang menentukan. Manusia tidak berhak mempercepat atau memperlambatnya. Mempercepat ajal (kematian) berarti mendahului takdir. Ketentuan tersebut berkaitan dengan euthunasia aktif. Selanjutnya pandangan Islam tentang euthunasia pasif. Menurut ajaran Islam, sakit yang menimpa seseorang dapat menghapus dosa. Meskipun demikian, ini sama sekali tidak berarti, bahwa penyakit yang menimpa seseorang harus dibiarkan saja tanpa upaya pengobatan, dengan alasan agar dosanya terhapus. Agama Islam memerintahkan untuk mengobati setiap penyakit yang menimpa manusia. perintah pengobatan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَبُشَيْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَا حَدَّثَنَا  
عِمْرَانُ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَّاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ أَمْرَةً مِنْ أَهْلِ  
الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السُّودَاءُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أَصْرَعُ  
وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي قَالَ إِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ  
يُعَافِيكَ قَالَتْ أَصْبِرُ فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin ‘Umar Al Qawarari; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dan Bisyr bin Al Mufadhdhal keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami ‘Imran Abu Bakr; telah menceritakan kepadaku ‘Athaa bin Abu Rabah dia berkata; Ibnu ‘Abbas berkata kepadaku; “maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita yang termasuk penghuni surga?” Aku menjawab; ‘Ya’ Ibnu Abbas berkata; “ada seorang wanita hitam datang kepada Nabi SAW lalu berkata; sesungguhnya aku terkena penderita epilepsi dan sering tersingkap auratku, maka berdoaalah kepada Allah untukku. Beliau bersabda: “jika engkau berkenan, engkau bersabar maka bagimu surga dan jika engkau berkenan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu”. Ia berkata; “tidak perlu bahkan aku akan bersabar. Namun berdoaalah kepada Allah agar (auratku) tidak tersingkap atau menyingkap dariku. Maka beliau mendoakan untuknya”.

Hadist tersebut diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab. Dalam bab seorang mukmin mendapat pahala karena musibah yang menimpanya dan No. Hadis 4673.

Terdapat satu kasus di Dusun Calangka Desa Patimpeng Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone yang bernama Andi Muhammad Arif (petta tunru). Dia menderita infeksi telapak kaki yang di derita selama 2 tahun 4 bulan. Beliau masuk kerumah sakit yang ada di Sinjai namun sudah tidak sanggup sampai akhirnya di bawah kerumah sakit Unhas untuk di rawat, pada awalnya si pasien ini menyerah dan meminta untuk di pulangkan namun pihak keluarga masih ingin bertahan untuk pengobatan namun akhirnya dokter pun sudah tidak sanggup lagi karena tidak ada harapan untuk sembuh lagi, akhirnya pasien di pulangkan oleh pihak keluarga dan seminggu setelah keluar si pasien meninggal dunia. Tuter andi Sahriana arif (anak dari pasien).

Upaya pengobatan bagi orang yang sakit, baik yang ringan maupun yang berat, harus dilakukan. Akan tetapi, sampai kapan pengobatan itu harus dilakukan, terutama untuk pasien yang kondisi penyakitnya sudah sampai kepada tingkat tidak dapat diobati lagi atau sudah masuk ktegori stadium terminal. Dalam hal ini tidak ada keterangan dari Rasulullah Saw. baik yang sifatnya memerintahkan melanjutkan pengobatan maupun yang melarang menghentikannya. Apabila masalahnya demikian, maka menyelesaikannya diserahkan pada dokter yang mengobatinya dan paien atau keluarganya. Apabila dokter menyatakan dan hal itu tentu saja merupakan hasil ijtihadnya bahwa penyakit tersebut sudah tidak bisa disembuhkan lagi atau sudah masukn dalam stadium terminal, dan pihak pasien maupun keluarganya meminta atau menyetujui dihentikannya upaya pengobatan, maka penghentian pengobatan tersebut hukumnya dibolehkan, meskipun akibatnya mungkin pasien tersebut akan meninggal. Dalam situasi dan kondisi demikian, tindakan yang bisa dilakukan oleh pasien atau

keluarganya adalah bersabar dan tawakkal serta berdoa Rasulullah Saw. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Anas. Doa tersebut berbunyi:

“ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku apabila kematian itu lebih baik untukku”.

Menurut Imam Syaukani, hadis ini merupakan dalil tentang dibolehkannya meninggalkan, menghentikan, atau tidak melakukan upaya pengobatan terhadap pasien yang kondisinya sudah tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Di samping itu, juga hadis tersebut merupakan dalil bahwa berobat dengan doa disertai tawakkal kepada Allah, adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.<sup>41</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa euthunasia pasif, di mana seorang dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut perkiraannya tidak mungkin disembuhkan lagi, atas permintaan pasien atau keluarganya, hukumnya dibolehkan. Termasuk juga dalam kategori ini, penghentian pengobatan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkannya, yang oleh dr. Rully Roesli dari Klinik Ginjal Bandung, disebut euthunasia akibat sikon. Namun demikian, hal itu tidak berarti ikhtiar untuk menyembuhkannya dengan cara lain, harus dihentikan sama sekali, karena ketentuan dan hakikat kesembuhan, serta hidup dan matinya seseorang pada akhirnya berada di tangan Allah Subhanahu Wata'ala.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, “*Euthunasia Menurut Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. h.87

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Positif Dan Hukum Islam*”. h. 87-88.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. a). euthunasia bertentangan dengan etik kedokteran, pasal 7d, “seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani”. Tindakan euthunasia menurut kode etik kedokteran Indonesia tidak membolehkan dilakukannya euthanasia aktif dan kelihatannya membolehkan euthanasia pasif dalam menghadapi pasien yang menurut perkiraan berdasarkan ilmu kedokteran sudah tidak mungkin disembuhkan lagi.  
b). UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
2. Walaupun euthunasia itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, sebagaimana diatur dalam pasal 344 KUHP, namun kenyataannya di Indonesia, sejak terbentuknya kitab undang-undang hukum pidana sampai sekarang belum ada kasus nyata dan di putus oleh pengadilan. Namun demikian dengan tercantumnya pasal 334 KUHP tersebut, pembuat undang-undang tentunya sudah menduga bahwa euthunasia akan terjadi di Indonesia, sehingga dianggap perlu untuk mengaturnya dalam undang-undang. Menurut Hukum Islam bahwa euthunasia pasif, di mana seorang dokter menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menurut perkiraannya tidak mungkin disembuhkan lagi, atas permintaan pasien atau keluarganya, hukumnya dibolehkan. Termasuk juga dalam kategori ini,

penghentian pengobatan karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkannya namun demikian, hal itu tidak berarti ikhtiar untuk menyembuhkannya dengan cara lain, harus dihentikan sama sekali, karena ketentuan dan hakikat kesembuhan, serta hidup dan matinya seseorang pada akhirnya berada di tangan Allah Subhanahu Wata'ala.

### **1. implikasi**

1. Perlu adanya perumusan Undang-Undang tentang euthanasia supaya ada ketetapan hukumnya.
2. Para ulama di Indonesia harus membahas dan menetapkan hukumnya sesuai dengan perkembangan zaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto, *metodologi penelitian sosial dan hukum* (cet. 1; Jakarta: Granit, 2004).
- Adji, Oemar Seno, *Hukum Pidana Pengembangan* (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ali, Zainuddin, *hukum pidana Islam* (cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Amir, Amri, Dan Hanafiah, M. Jusuf, “*Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan edisi 4*” (cet. 4; Jakarta: EGC, 2008).
- Amir, Amri, Dan Hanafiah, M. Jusuf, “*Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan edisi 5*” (cet. 5; Jakarta: EGC, 2016).
- Amir, Amri, Dan Hanafiah, M. Jusuf, “*Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan Edisi 3*” (Cet. 3; Jakarta: Egc, 1999).
- Asikin, Zainal dan amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Et Al, M. Boediarti, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Cet. 2: Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Guwandi, J, *Hukum medik (medic law)* (cet.2; Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005).
- Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 2011).
- Ide, Alexandra , *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan* (Cet. 1; Yogyakarta: Gresia Book Publisher, 2012).
- Jaya, Alwi, *Etika & Hukum Kesehatan* (Cet. 1; Takalar Sulawesi Selatan: Pustaka As Salam, 2014).
- K. Bertens, *Etika* (Cet. 10; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Lamintang, Theo, dan Lamintang, P.A.F, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan* (cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Mahardika, Tim, *KUHP dan KUHP* (Cet. 1; Pustaka Mahardika, 2010).
- Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, (cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Muslich, Ahmad wardi, “*Euthunasia menurut pandangan hukum positif dan hukum islam*” (cet. 1; jakarta: rajawali pers, 2014).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan penelitian Hukum*, (cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan* (Cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).

Notoatmodjo, Soekidjo, “*Etika Dan Hukum Kesehatan*” (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Pentashihah, Lajnah, *Al-Quran & Terjemah* (Bekasi: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015).

Purba, Jenny Marlindawani & Pujiastuti, Sri Endang, “*dilema etik dan pengambilan keputusan etis dalam praktik keperawatan jiwa*” (cet. 1; jakarta: EGC, 2009).

Pustaka Buana, *KHUP dan KUHP* (cet. II, Buana Press, 2014).

Prakoso, Djoko, *Euthunasia “Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana”* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

Rachman, Fazlur, *Islam* (Cet. 2; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992).

Ramali, Ahmad, dan Pamoentjak, St., Hendra T.laksman, *Kamus Kedokteran* (cet.26; Jakarta: Djambatan, 2005).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politea, 1976).

Simorangking Dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Soepardan, Suryani dan Hadi, Dadi Anwar, *Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan* (Cet. 1; Jakarta: EGC, 2007).

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politea, 1976).

Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Cet. 2; Bandung: Alfabeta, 2009).

Setiawan, Eko, *Eksistensi Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Al-Ahwal, 1 April 2015).

Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran* (Cet. 1; Mandar Maju, 2001).

Syamsuddin, Rahman dan Pabbu, Amiruddin, *Kode Etik dan Hukum Kesehatan* (Cet. 1; Toddopuli Makasar: Kedai Aksara, 2012).

Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Pranata Group, 2010).

Ta’adi, *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional* (Cet. 1; Jakarta: EGC, 2009).

Taher, Tarmizi, “*Medical Ethics*” (cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Widodo, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolut, 2002).

### Sumber lain

Af' idah, Hikmatul Andi, *Jurnal Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama* (Makassar, 2014) SKRIPSI\_ANDI\_HIKMATUL\_AF' IDAH.pdf (10 November 2017).

Arifin, Zainal, *Jurnal Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, h. 23 [www.academia.edu](http://www.academia.edu) (10 November 2017).

Budi, Ari, “*jurnal tentang euthunasia*”, (selasa, 02 Desember 2014). Aribud [JURNAL TENTANG EUTANASIA.htm](http://JURNAL.TENTANG.EUTANASIA.htm)

Rada, Arifin, *Jurnal Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei).

UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, h. 14 [www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com) (1 November 2017).

Yudaningsih, purwastuti, Lilik, “*tinjauan yuridis euthunasia dilihat dari aspek hukum pidana*”, jurnal ilmu hukum 2015. 43316-ID-tinjauan-yuridis-euthanasia-dilihat-dari-aspek-hukum-pidana.pdf

Yusof, Farahwahida mohd, *jurnal teknologi* (15 agustus 2013), h. 39. [www.Jurnalteknologi.utm.my](http://www.Jurnalteknologi.utm.my) (rabu, 25 oktober 2017).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rosmini, lahir di Gattareng pada tanggal 12 Desember 1995. Penulis adalah anak terakhir dari delapan bersaudara, buah hati dari pasangan Masnung dan Halija. Penulis pertama kali melangkahkan kaki ke dunia pendidikan pada tahun 2001 di SD Negeri 257 Gattareng Kec. Salomekko Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke tingkat pertama di MTs Patimpeng pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke tingkat

atas pada tahun 2010 di SMA Negeri 1 Kahu yang sekarang dikenal dengan SMA Negeri 6 Watampone dan tamat pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013 dengan jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.